



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2019 - 2023



TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya, Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023.

Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis merupakan suatu kewajiban dan langkah awal bagi setiap instansi pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Pembangunan, Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berbasis kinerja sebagai komitmen Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Barat 2019-2023.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023 disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023 ini belum sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan dan atau saran perbaikan untuk penyempurnaannya.

Demikian, kiranya Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat dijadikan sebagai informasi, referensi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023. Terima kasih.

Mataram, 2019

SEKRETARIS DAERAH
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Ir. H. ROSIADY SAYUTI, M.Sc.Ph.D

Pembina Utama Madya
NIP. 19610608 198703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
 BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.	5
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	5
2.2 Sumber Daya Aparatur	12
2.3 Kinerja Pelayanan	15
2.4 Peluang dan Tantangan	26
 BAB III	
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis	27
3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28
 BAB IV	
TUJUAN DAN SASARAN.....	32
 BAB V	
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
 BAB VI	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	44
 BAB VII	
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	73
 BAB VII	
PENUTUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang wajib disusun/ditetapkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah agar mampu menjawab tuntutan internal dan eksternal yang berada dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan penyusunan/penetapan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, Organisasi Perangkat Daerah lebih dapat mempertajam serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan setiap lima tahunan yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan dalam bentuk strategi kebijakan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat dicapai secara bertahap sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, didasarkan pada ketentuan perundangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indones Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 perubahan ke dua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indones Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembengunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembengunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pajang Daerah (RPJPD) Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-20025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan dan penetapan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Mempertajam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2023;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja (PK).
4. Menjadi pedoman/acuan dalam menyusun Rencana Kerja bagi Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

- BAB I. Pendahuluan, dengan sub bahasan : latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II. Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi NTB dengan sub bahasan : Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber daya apratur, Kinerja Pelayanan, serta Peluang dan tantangan
- BAB III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi NTB, dengan sub bahasan : Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi, Penentuan Isi-isu strategis, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran, Sekretariat Daerah Provinsi NTB mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- BAB.V. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi NTB, dengan mengacu pada Strategi dan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif dengan sub bahasan : Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif setda Provinsi NTB yang mengacu pada pencapaian target RPJMBD 2019-2023.
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat Daerah Provinsi dengan sub. Bahasan : Indikaor kinerja Seketaria Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2023.
- BAB VIII. Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

2.1.1 Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dengan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2.1.2 Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Sekretaris dengan jenjang eselonering I.b, membawahi 3 (tiga) asisten dengan tingkat eselonering II.a, masing-masing asisten membawahi Biro-Biro dengan tingkat eselonering II.b, setiap Biro membawahi Bagian dengan tingkat eselonering III.a, masing-masing bagian membawahi sub bagian dengan tingkat eselonering IV.a, secara rinci, susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

Sekretaris Daerah selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat membawahi :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

1.1. Biro Pemerintahan :

a. Bagian Bina Pertanahan, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan;
- 2) Sub Bagian Fasilitas Tanah Bermasalah; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha.

b. Bagian Otonomi Daerah, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Penataan Daerah;
- 2) Sub Bagian Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD; dan
- 3) Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Daerah.

c. Bagian Bina Administrasi Kewilayahan, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Pembinaan Wilayah;
- 2) Sub Bagian Fasilitas Kebijakan Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Kebencanaan; dan
- 3) Sub Bagian Fasilitas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2. Biro Hukum :

a. Bagian Perundang-undangan, terdiri atas;

- 1) Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah;
- 2) Sub Bagian Rancangan Peraturan Kepala Daerah; dan Kerjasama
- 3) Sub Bagian Rancangan Ketetapan.

b. Bagian Bantuan Hukum dan HAM, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Sengketa Hukum;
- 2) Sub Bagian Pengkajian dan Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama dan
- 3) Sub Bagian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kekayaan Intelektual (KI).

c. Bagian Pembinaan Hukum, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
- 2) Sub Bagian Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten Kota dan

3) Sub Bagian Tata Usaha.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3. Biro Kesejahteraan Rakyat :

a. Bagian Keagamaan, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Pembinaan Keagamaan dan Kerukunan Umat Beragama;
- 2) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Keagamaan; dan
- 3) Sub Bagian Pendidikan Keagamaan.

b. Bagian Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Kesehatan dan Pengendalian Penduduk;
- 2) Sub Bagian Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- 3) Sub Bagian Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

c. Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Sub Bagian Kepemudaan dan Olahraga; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :

2.1. Biro Perekonomian :

a. Bagian Produksi Daerah, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Pertambangan dan Energi;
- 2) Sub Bagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; dan
- 3) Sub Bagian Perdagangan dan Perindustrian.

b. Bagian Penanaman Modal, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Penanaman Modal dan Promosi;
- 2) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Lembaga Keuangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

c. Bagian Pengembangan Perekonomian, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Data dan Statistik Perekonomian;

- 2) Sub Bagian Pariwisata dan Perhubungan; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa:

a. Bagian Administrasi Pembangunan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Pembangunan Ekonomi;
- 2) Sub Bagian Pembangunan Sosial Budayadan Kesejahteraan Rakyat; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha.

b. Bagian Administrasi Pembangunan Infrasrtuktur dan Tata Ruang, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2) Sub Bagian Pembangunan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup; dan
- 3) Sub Bagian Pembangunan Perhubungan dan Tata Ruang.

c. Bagian Pengadaan Barang /Jasa, terdiri atas;

- 1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Secara Elektronik; dan
- 3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;

d. Kelompok Jabatan Fungsional

2.3 Biro Administrasi Kerjasama:

a. Bagian Kerjasama Pemerintah, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Fasilitas Kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 2) Sub Bagian Kerjasama Pemerintah Antar Provinsi; dan
- 3) Sub Bagian Fasilitas Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri.

b. Bagian Kerjasama Non Pemerintah, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Fasilitas Kerjasama Non Pemerintah Antara Kabupaten/Kota;
- 2) Sub Bagian Kerjasama Non Pemerintah Antar Provinsi; dan

- 3) Sub Bagian Kerjasama Non Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.
- c. Bagian Pengendalian Kerjasama, terdiri atas;
 1. Sub Bagian Pengendalian Kerjasama Pemerintah;
 2. Sub Bagian Penegendalian Kerjasama Non Pemerintah; dan
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Asisten Administrasi dan Umum, membawahi :

3.1 Biro Organisasi :

- a. Bagian Kelembagaan, terdiri atas;
 - 1) Sub Bagian Analisis Kelembagaan;
 - 2) Sub Bagian Fasilitas dan Monitoring Evaluasi Kelembagaan; dan
 - 3) Sub Bagian Analisis Kelembagaan UPT Daerah dan Fasilitas Kelembagaan Pusat.
- b. Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi, terdiri atas;
 - 1) Sub Bagian Standarisasi dan Budaya Kerja;
 - 2) Sub Bagian Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja; dan
 - 3) Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
- c. Bagian Analisis Formasi Jabatan dan Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Jabatan;
 - 2) Sub Bagian Sumber Daya Aparatur; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

3.2 Biro Umum:

- a. Bagian Kesekretariatan dan Rumah Tangga, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - 2) Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi;
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perjalanan; dan
 - 4) Sub Bagian Tata Usaha Sekda, Asisten dan Staf Ahli Gubernur.

- b. Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
- c. Bagian Sarana Prasarana Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Sarana Perkantoran;
 - 2) Sub Bagian Prasarana Perkantoran; dan
 - 3) Sub Bagian Sarana Prasarana Rumah Jabatan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

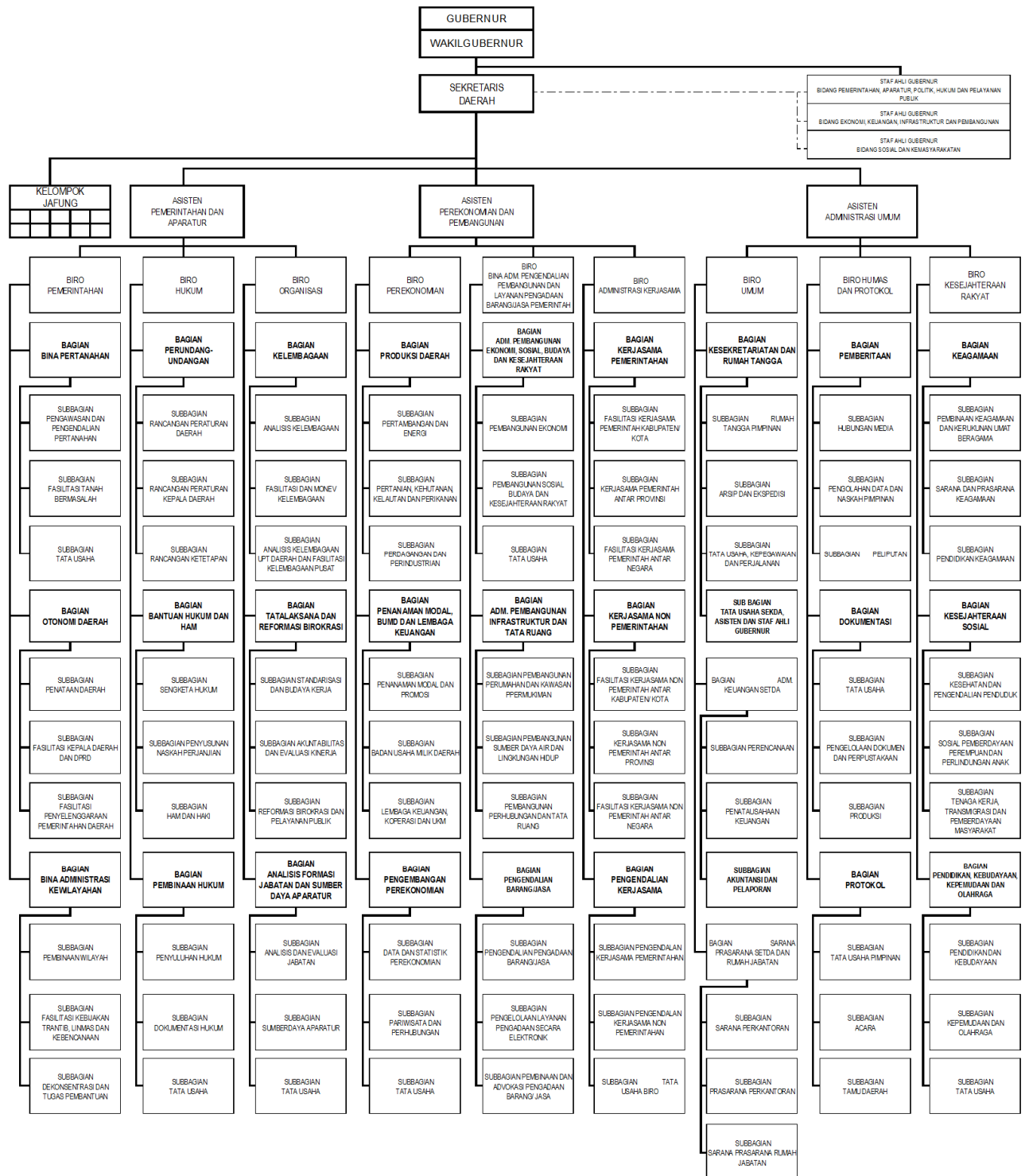
3.3 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol :

- a. Bagian Pemberitaan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Hubungan Media;
 - 2) Sub Bagian Pengolahan Data dan Naskah Pimpinan; dan
 - 3) Sub Bagian Peliputan.
- b. Bagian Dokumentasi, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Dokumen dan Perpustakaan;
 - 2) Sub Bagian Produksi; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Bagian Protokol, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - 2) Sub Bagian Tamu Daerah; dan
 - 3) Sub Bagian Acara.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain membawahi 3 (tiga) Asisten dan 8 (delapan) Biro, Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat secara Administratif mengkoordinasikan 3 (tiga) Staf Ahli Gubernur yaitu :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Sosial dan Kemasyarakatan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



2.2 Sumber Daya Aparatur.

Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk kemudian dipetakan berdasarkan jenjang kepangkatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan termasuk pula persebaran Aparatur Sipil Negara tersebut pada masing-masing biro.

Komposisi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat, baik yang memangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum menurut golongan sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Komposisi Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Eselon

No.	Uraian	Eselon				JFT	Jumlah
		I	II	III	IV		
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-		1
2	Asisten	-	3	-	-	-	3
3	Staf Ahli	-	3	-	-	-	3
4	Biro Pemerintahan	-	1	3	9	-	13
5	Biro Hukum	-	1	3	9	-	13
6	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	1	3	9	-	13
7	Biro Perekonomian	-	1	3	9	-	13
8	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP	-	1	3	9	12	25
9	Biro Organisasi	-	1	3	9	1	14
10	Biro Umum	-	1	3	10	5	19
11	Biro Humas dan Protokol	-	1	3	9	4	17
12	Biro Kerjasama	-	1	3	9	-	13
Total		1	15	27	82	22	147

Sumber Data : Sub. Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perjalanan Biro Umum periode 31 Maret 2019.

Dari tabel 2.1 di atas, jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara kuantitas dan penyebarannya relatif sudah mencukupi, namun demikian secara kualitas

masih perlu ditingkatkan sesuai dengan bidang tugas yang diemban baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 324 Orang. Komposisi ASN berdasarkan golongan, lebih didominasi oleh golongan III sebanyak 260 orang atau 56,35% , golongan II sebanyak 144 orang atau sebesar 30,97%, golongan IV sebanyak 50 orang atau sebesar 10,75% dan golongan I sebanyak 9 orang atau sebesar 1,94%. jumlah ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat, secara rinci sebagaimana dalam tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Komposisi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan golongan

No.	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	1	1
2	Asisten	-	-	-	3	3
3	Staf Ahli	-	-	-	3	3
4	Biro Pemerintahan	1	9	25	6	41
5	Biro Hukum	-	4	27	4	35
6	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	12	25	4	41
7	Biro Perekonomian	1	8	20	7	36
8	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP	-	8	37	5	50
9	Biro Organisasi	-	9	18	5	32
10	Biro Umum	7	76	54	4	141
11	Biro Humas dan Protokol	-	14	51	5	70
12	Biro Administrasi Kerjasama	-	4	5	3	12
T o t a		9	144	262	50	465
Persentase (%)		1,94	30,97	56,34	10,75	

Sumber Data : Sub. Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perjalanan Biro Umum periode 31 Maret 2019.

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Komposisi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah
Nusa Tenggara Barat berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Uraian	Pendidikan			
		S3	S2	S1	Dipl
1	2	3	4	5	6
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-
2	Asisten	-	2	1	-
3	Staf Ahli	-	2	1	-
4	Biro Pemerintahan	-	5	14	5
5	Biro Hukum	-	7	23	-
6	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	2	25	-
7	Biro Perekonomian	-	7	14	2
8	Biro Bina APP dan LPBJP	-	8	30	3
9	Biro Organisasi	-	6	11	3
10	Biro Umum	-	5	29	10
11	Biro Humas dan Protokol	-	8	23	20
12	Biro Administrasi Kerjasama		4	2	3
	Total	1	56	173	46

Lanjutan tabel 2.3

No.	Uraian	Pendidikan			
		SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	2	7	8	9	10
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	1
2	Asisten	-	-	-	3
3	Staf Ahli	-	-	-	3
4	Biro Pemerintahan	16	1	-	41
5	Biro Hukum	5	-	-	35
6	Biro Kesejahteraan Rakyat	14	-	-	41
7	Biro Perekonomian	12	-	1	36
8	Biro Bina APP dan LPBJP	9	-	-	50
9	Biro Organisasi	11	1	-	32
10	Biro Umum	77	13	7	141
11	Biro Humas dan Protokol	19	-	-	70
12	Biro Administrasi Kerjasama	2	1		12
	Total	165	16	8	465

Sumber Data : Sub. Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perjalanan Biro Umum. periode 31 Maret 2019.

Berdasarkan tabel 2.3 di atas, tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat didominasi tingkat pendidikan SLTA sebanyak 165 orang atau 38,48%, Strata 1 sebanyak 173 orang atau 37,20% Strata 2 sebanyak 56 orang atau 12,04%, tingkat pendidikan Diploma sebanyak 46 orang atau 9,89%, tingkat SLTP sebanyak 16 orang atau 3,44% dan tingkat SD sebanyak 8 orang atau 1,725%, sedangkan tingkat pendidikan paling minim, yaitu tingkat pendidikan Strata 3 sebanyak 1 orang atau 0,22%.

2.3 Kinerja Pelayanan.

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai fasilitator dan advisor dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang amanah, berupaya melaksanakan tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Badan/Dinas Daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga-lembaga lainnya di daerah. Untuk mendukung tugas dan fungsi dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

1. Merumuskan program lingkup Sekretariat Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023;
2. Melaksanakan Pengelolaan Rumah Tangga serta sarana dan Prasarana Pemerintahan Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Ketentuan dan kebutuhan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
3. Mengendalikan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertibnya administrasi Pemerintahan;
4. Mengendalikan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
5. Mengatur kegiatan perumusan kebijakan teknis dibidang Perekonomian daerah dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;
6. Mengawasi perumusan kebijakan teknis dibidang Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka kepastian hukum;
7. Mengawasi perumusan kebijakan dibidang organisasi dan tatalaksana perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat;

8. Mengkoordinasikan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;
9. Mengendalikan kegiatan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, pelayanan dan sarana Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat berdasarkan ketentuan dan kebutuhan;
10. Melakukan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan pengumpulan dan analisis data;
11. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya baik di tingkat Provinsi maupun Pusat untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
12. Mengatur kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kendala yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
13. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga sesuai dengan kebutuhan dalam rangka transparansi dan koordinasi pelaksanaan tugas.
14. Memfasilitasi dan mengevaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Non Pemerintah dan lembaga lainnya baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja RENSTRA 2013-2018 Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat

No.	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Kondisi Awal RENSTRA (Tahun 2013)	Target Kinerja Renstra Tahun					Realisasi Capaian Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Biro Pemerintahan																			
1.1	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2	Tingkat Kelancaran tugas aparatur			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3	Rencana program			Dokumen	3	5	6	8	6	6	5	6	8	6	6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4	Rencana program kerjasama			Dokumen		1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5	Rencana pemekaran wilayah			Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6	Rencana pemekaran wilayah			Dokumen rekomendasi	-	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	100,00	100,00
1.7	Terselenggara nya Lomba Kecamatan			Tema	-	-	-	-	8		-	-	-	8	-	-	-	-	100,00	-
1.8	Dokumen Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan yang Berprestasi ditingkat Nasional			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.9	Kecepatan penemuan arsip			Menit	15	12	10	10	-	-	12	10	10	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
1.10	Rencana pengembanga n kapasitas daerah			Dokumen	1	1	-	2	2	2	1	-	2	2	2	100,00	-	100,00	100,00	100,00
1.11	Manajemen Aset			dokumen	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	-	-	100,00	100,00	100,00
1.12	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan			%	-	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100,00
1.13	Rencana Program kebijakan			Dokumen	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100,00	100,00
1.14	Rencana Program kebijakan kependudukan			Dokumen	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	100,00	100,00

Pencapaian Kinerja RENSTRA 2013-2018 Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat

No.	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Kondisi Awal RENSTRA (Tahun 2013)	Target Kinerja Renstra Tahun					Realisasi Capaian Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2	Biro Hukum																			
2.1	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2	Tingkat Kelancaran tugas aparatur			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3	Tingkat Kompetensi Aparatur			%	100	-	-		100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100,00
2.4	Rencana program			Dokumen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.5	Manajemen Aset			dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.6	Terbentuknya produk hukum daerah			Dokumen	3804	740	740	740	740	740	740	740	740	740		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	- Perda				54	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	- Pergub				221	30	30	30	30	30	30	30	30	30		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	- SK Gubernur				3529	700	700	700	700	700	700	700	700	700		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3	Biro Kesejahteraan Rakyat																			
3.1	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2	Tingkat kelancaran tugas aparatur			Unit	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3	Tingkat kelancaran tugas aparatur			Orang	50	50	-	-	50	50	50	-	-	50	50	100,00	-	-	100,00	100,00
3.4	Cakupan aparatur yang memiliki Kopetensi			Orang	4		4	4	4	4	4	-	4	4	4	-	-	100,00	100,00	100,00
3.5	Rencana Program			Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.6	Manajemen Asset			Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.7	Peningkatan dan penghayatan agama dalam kehidupan bermasyarakat			Dokumen	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.8	Penyebaran penyakit menular yang dicegah			Lokasi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.9	lingkungan Sekolah yang ditingkatkan kebersihannya			Lokasi	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.10	Perempuan dan Anak Tindak Kekerasan yang ditangani			Lokasi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.11	Data Akseptor KB			Dokumen	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	100,00	-	-	-	-
3.12	Pemuda Pelopor sesuai Bidanganya yang terpilih			Orang	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pencapaian Kinerja RENSTRA 2013-2018 Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat

No.	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Terget NSPK	Target IKK	Satuan	Kondisi Awal RENSTRA (Tahun 2013)	Target Kinerja Renstra Tahun					Realisasi Capaian Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3.13	Kesenian Daerah			Kelompok	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.14	Forum Politik yang terpantau			Kab/Kota	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.15	Adat Budaya Lokal di Daerah yang terpilah			Kab/Kota	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.16	PJTKI yang berkualitas			Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.17	Lokasi Tran yang subur			Lokasi	1	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	100,00	-	-	-	-
3.18	Kegiatan Partisipasi masyarakat yang terpantau			Kab/Kota	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.19	PMKS yang ikut-serta dalam sosialisasi			Orang	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.20	Kerjasama lintas sektor yang terbina			SKPD	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.21	Peningkatan Iman dan Taqwa Aparatur			Orang	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Biro Perekonomian																			
4.1	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2	Tingkat Kelancaran tugas aparatur			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3	Rencana program			Dokumen	8	8	5	5	5	5	8	5	5	5	5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.4	Manajemen Aset			dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.5	Kebijakan program			Dokumen	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	100,00	100,00	100,00	-	100,00
4.6	Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah			Dokumen	2	-	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	100,00	100,00	100,00	100,00
4.7	Kebijakan peninngkatan dan pengembangan produksi daerah			Dokumen	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	100,00	100,00	100,00	100,00
4.8	Kebijakan pengelolaan BUMD			Dokumen	3	3	3	3	8	3	3	3	3	6	3	100,00	100,00	100,00	75,00	100,00

Pencapaian Kinerja RENSTRA 2013-2018 Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat

No.	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Terget NSPK	Target IKK	Satuan	Kondisi Awal RENSTRA (Tahun 2013)	Target Kinerja Renstra Tahun					Realisasi Capaian Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
4.9	Kebijakan pengembangan investasi daerah			Dokumen	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	100,00	100,00	100,00	100,00
4.10	Rencana program kebijakan perekonomian			Dokumen	-	-	3	3	3	3	-	3	3	3	3	-	100,00	100,00	100,00	100,00
4.11	Rencana Pengembangan Kebijakan Kerjasama antar daerah			Dokumen	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
5	Biro Bina Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah																			
5.1	Tingkat Kelancaran			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.2	Tingkat Kelancaran tugas aparatur			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.3	Tingkat Kompetensi Aparatur			%	0	167	5	5	7	8	167	5	5	7	8	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.4	Rencana Program			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.5	Penyelesaian Dokumen			Bulan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.6	kualitas layanan pengadaan barang jasa			%	45	60	65	75	80	85	60	65	75	85	85	100,00	100,00	100,00	106,25	100,00
	Rekomendasi			Dokumen	6	6	6	6	12	12	6	6	6	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rekomendasi			Dokumen	2	2	4	-	-	-	2	4	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
	Rekomendasi			Dokumen	-	-	-	4	6	6	-	-	4	6	6	-	-	100,00	100,00	100,00
	Rekomendasi			Dokumen	-	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	100,00	100,00

Pencapaian Kinerja RENSTRA 2013-2018 Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat

No.	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Kondisi Awal RENSTRA (Tahun 2013)	Target Kinerja Renstra Tahun					Realisasi Capaian Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
6	Biro Administrasi Kerjasama Dan Sumber Daya Alam																			
6.1	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran			%	100	100	100	100	-	-	100	100	100			100,00	100,00	100,00	-	-
6.2	Tingkat Kelancaran tugas aparatur			%	100	100	100	100	-	-	100	100	100			100,00	100,00	100,00	-	-
6.3	Tingkat kompetensi			%	-	5	3	-	-	-	5	3	-			100,00	100,00	-	-	-
6.4	Manajemen Aset			dokumen	-	-	-	3	-	-	-	-	3			-	-	100,00	-	-
6.5	Rencana program			Dokumen	5	6	7	5	-	-	6	7	5			100,00	100,00	100,00	-	-
6.6	Rencana Pengembangan Kebijakan			Dokumen	6	1	1	1	-	-	1	1	1			100,00	100,00	100,00	-	-
6.7	Rencana Pengembangan Kebijakan			Dokumen	30	30	20	29	-	-	30	20	29			100,00	100,00	100,00	-	-
6.8	Kebijakan Kerjasama &			Dokumen	2	2	2	2	-	-	2	2	2			100,00	100,00	100,00	-	-
6.9	Rencana Pengembangan Kebijakan			Dokumen	-	-	-	26	-	-	-	-	26			-	-	100,00	-	-
6.10	Rencana Pengembangan Kebijakan Kerjasama dengan pihak ketiga			Dokumen	35	35	19	-	-	-	35	19	-			100,00	100,00	-	-	-
7	Biro Organisasi																			
7.1	Rasio dokumen Adm Perkantoran Kepegawaian dan Keuangan yg			%	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.2	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana			%	50	50	100	100	100	100	50	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.3	Meningkatnya kinerja aparatur			%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.4	Ketepatan waktu penyampaian laporan			%	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.5	Daya guna aset daerah			%	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.6	Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik			%	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
7.7	Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik			%					100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100,00
7.8	Perangkat Daerah Tertata Sesuai Peraturan Perundang-undangan			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.9	Informasi Jabatan Sebagai Pedoman Penataan Kepegawaian Ketatalaksanaan dan Kelembagaan			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pencapaian Kinerja RENSTRA 2013-2018 Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat

No.	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Kondisi Awal RENSTRA (Tahun 2013)	Target Kinerja Renstra Tahun					Realisasi Capaian Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
7.10	Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.11	Penanganan pelanggaran disiplin Kepegawaian			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.12	SKPD berkinerja baik meningkat			%	-	-	-	-	25	50	-	-	-	25	50	-	-	-	100,00	100,00
7.13	Dokumen Pertanggungj awaban Pelaksanaan Pembangunan yang			Dokumen LAKIP/ LKJIP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.14	Ketepatan Target dan Waktu Pencapaian Program Pembangunan			%	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00
7.15	Jumlah yang mengakses layanan informasi publik			Kunjungan (Visitors)	-	-	-	20000	25000	30000	-	-	20000	25000	30000	-	-	100,00	100,00	100,00
8	Biro Umum																			
8.1	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran			%		90	90	100	100	100	94,52	98,51	98,58	100	100,00	105,02	109,46	98,58	100,00	100,00
8.2	Tingkat Kelancaran tugas aparatur			%		90	90	100	100	100	94,14	77,63	98,45	100	80,30	104,60	86,26	98,45	100,00	80,30
8.3	Tingkat Disiplin Aparatur			%		95	-	-	-	-	99,05	-	-		0,00	104,26	-	-	-	-
8.4	Tingkat Kompetensi Aparatur			%		90	90	100	100	100	98,78	0	95,64	0	93,86	109,76	0,00	95,64	0,00	93,86
8.5	Rencana program			Dokumen		7	7	8	8	8	7	7	8	8	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.6	Tingkat kelancaran pelayanan pimpinan daerah			%		90	90	100	100	100	91,74	100	100	99,87	91,66	101,93	111,11	100,00	99,87	91,66
8.7	Manajemen Aset			dokumen		6	5	2	2	2	6	5	2	2	2,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.8	Masyarakat yang Mengakses Layanan NTB Online			Orang	4653	25.000	85.000	150.000	-	-	25.347	575.031	852.649	-	-	101,39	676,51	568,43	-	-
8.9	Keikutsertaan pemuda dalam kegiatan Upacara Pemerintahan			%		90	90	100	100	100	100	100	100	-	-	111,11	111,11	100,00	-	-
8.10	Tingkat kelancaran komunikasi informasi dan mass media			%		95	95	100	-	-	98,3	100	98,05	-	-	103,47	105,26	98,05	-	-
8.11	Tingkat penyebaran informasi kepada masyarakat			%		90	90	-	-	-	98,67	99,87	-	-	-	109,63	110,97	-	-	-
9	Biro Humas dan Protokol																			
9.1	Tingkat Kelancaran administrasi			%	-	-	90	90	90	100	-	-	90	100	100	-	-	100,00	111,11	100,00
9.2	Tingkat Kelancaran tugas aparatur			%	-	-	90	90	90	95	-	-	90	100	100	-	-	100,00	111,11	105,26
9.3	Tingkat Kompetensi Aparatur			%	-	-	-	-	90	92	-	-	-	90	95	-	-	-	100,00	103,26
9.4	Rencana program			Dokumen	-	-	6	6	6	6	-	-	6	6	6	-	-	100,00	100,00	100,00
9.5	Manajemen Aset			dokumen	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100,00	100,00
9.6	Tingkat kelancaran pelayanan pimpinan			%	-	-	95	95	95	98	-	-	95	100	100	-	-	100,00	105,26	102,04

Pencapaian Kinerja RENSTRA 2013-2018 Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat

No.	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Terget NSPK	Target IKK	Satuan	Kondisi Awal RENSTRA (Tahun 2013)	Target Kinerja Renstra Tahun					Realisasi Capaian Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
9.7	Tingkat kelancaran komunikasi informasi dan mass media			%	-	-	95	95	95	98	-	-	95	100	100	-	-	100,00	105,26	102,04
9.8	Tingkat penyebaran informasi kepada			%	-	-	95	95	95	98	-	-	95	100	100	-	-	100,00	105,26	102,04

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Pendanaan Rensta 2013 -2018 Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

No	Kode/ Urusan/ Program	Urusan/Program Prioritas	Target Renstra Pada Tahun Ke -					Pagu Anggaran Pada tahun Ke -					Rasio antara Pagu dan Target Tahun Ke - (%)					Rata-rata Pertumbuhan		Penanggung Jawab
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																		
	4.01	Administrasi Pemerintahan																		
	4.01.03	Sekretariat Daerah	74.418.194	79.160.862	127.312.802	91.516.206	141.423.657	69.624.328	67.619.914	80.394.830	77.494.751	72.871.534	93,56	85,42	63,15	84,68	51,53	0,90	0,05	
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17.062.131	20.431.592	19.898.174	23.148.135	26.387.842	15.741.332	17.586.735	21.044.353	20.880.157	20.997.831	92,26	86,08	105,76	90,20	79,57	0,55	0,33	Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Biro Ekonomi, Biro AP & LPBJP, Biro Kesra, Biro Kerjasama dan Biro Humas.
2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24.881.610	11.473.074	48.285.993	12.079.991	52.192.158	24.508.880	10.998.742	14.737.858	11.739.211	8.381.057	98,50	95,87	30,52	97,18	16,06	1,10	(0,66)	Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Biro Ekonomi, Biro AP & LPBJP, Biro Kesra, Biro Kerjasama dan Biro Humas.
3	03	Program peningkatan disiplin aparatur	117.807	400	-	785.000	235.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,99	-	Biro Biro Kesra dan Biro Kerjasama.
4	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.353.546	607.446	227.700	260.050	300.650	1.469.953	607.446	133.300	319.000	2.244.263	108,60	100,00	58,54	122,67	746,47	(0,78)	0,53	Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Hukum, , Biro AP & LPBJP, Biro Kesra dan Biro Humas.
5	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	651.986	705.347	694.390	724.498	863.896	487.423	537.317	519.656	876.022	962.806	74,76	76,18	74,84	120,91	111,45	0,33	0,98	Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Biro Ekonomi, Biro AP & LPBJP, Biro Kesra dan Biro Humas.
7	07	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	40.990	42.790	115.002	114.362	127.782	29.904	25.104	61.904	108.851	328.666	72,96	58,67	53,83	95,18	257,21	2,12	9,99	Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Ekonomi, Biro Kesra, Biro Humas dan Biro Kerjasama.
8	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	6.531.060	11.179.608	22.602.312	14.183.155	15.324.500	6.531.060	7.199.408	6.277.900	9.916.817	8.674.453	100,00	64,40	27,78	69,92	56,61	1,35	0,33	Biro Umum dan Biro Humas.
9	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2.396.341	1.459.821	380.365	390.876	454.351	2.396.341	1.459.821	377.865	405.420	538.050	100,00	100,00	99,34	103,72	118,42	(0,81)	(0,78)	Biro Umum, Biro Organisasi dan Biro AP & LPBJP
10	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.704.360	1.960.654	2.435.266	2.966.436	3.270.577	1.704.360	1.960.654	2.386.964	2.754.986	2.483.545	100,00	100,00	98,02	92,87	75,94	0,92	0,46	Biro AP & LPBJP
11	23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	975.100	1.143.601	1.293.668	1.293.668	1.579.600	975.100	1.143.601	1.255.268	-	-	100,00	100,00	97,03	-	-	0,62	(1,00)	Biro Umum
12	25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	2.643.603	467.000	240.452	175.455	250.000	73.500	467.000	268.352	325.452	-	2,78	100,00	111,60	185,49	-	(0,91)	(1,00)	Biro Pemerintahan, Biro Ekonomi dan Biro AP & LPBJP
13	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.334.330	2.306.217	2.006.852	2.231.719	2.454.891	2.334.330	2.462.140	1.926.590	2.840.945	2.369.103	100,00	106,76	96,00	127,30	96,51	0,05	0,01	Biro Hukum
14	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	767.075	503.240	999.911	850.000	920.000	484.675	503.240	1.090.191	1.378.262	544.900	63,18	100,00	109,03	162,15	59,23	0,20	0,12	Biro Organisasi dan Biro Pemerintahan
15	29	Program Peningkatan Tertib Administrasi	-	-	-	-	-	897.357	1.446.812	1.526.226	2.823.768	2.474.492	-	-	-	-	-	-	1,76	Biro Pemerintahan
16	30	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	481.580	405.080	444.640	533.570	620.000	481.580	405.080	449.640	444.640	411.262	100,00	100,00	101,12	83,33	66,33	0,29	(0,15)	Biro Pemerintahan
17	31	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	5.062.020	12.391.074	13.145.448	14.950.000	15.375.000	5.062.020	12.391.074	19.796.529	7.795.180	8.724.465	100,00	100,00	150,60	52,14	56,74	2,04	0,72	Biro Kesra
18	33	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	169.824	122.200	215.490	250.000	300.000	169.824	122.200	210.820	192.710	210.000	100,00	100,00	97,83	77,08	70,00	0,77	0,24	Biro Kesra
19	34	Program Peningkatan Mutu pendidikan dan tenaga Kependidikan.	228.145	204.100	267.920	320.000	350.000	228.145	204.100	292.920	263.000	250.000	100,00	100,00	109,33	82,19	71,43	0,53	0,10	Biro Kesra
20	35	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	35.000	28.000	59.800	50.000	75.000	35.000	28.000	63.870	103.665	29.500	100,00	100,00	106,81	207,33	39,33	1,14	(0,16)	Biro Kesra

No	Kode/ Urusan/ Program	Urusan/Program Prioritas	Target Renstra Pada Tahun Ke -					Pagu Anggaran Pada tahun Ke -					Rasio antara Pagu dan Target Tahun Ke - (%)					Rata-rata Pertumbuhan		Penanggung Jawab
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
21	36	Program Keluarga Berencana	23.750	-	-	-	-	23.750	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	(1,00)	(1,00)	Biro Kesra
22	37	Program Pengembangan Sistem Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	435.705	492.660	442.781	500.000	500.000	435.705	492.660	442.781	934.686	640.638	100,00	100,00	100,00	186,94	128,13	0,15	0,47	Biro Organisasi
23	38	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	599.538	961.844	1.358.240	1.337.100	1.442.500	599.538	961.844	1.695.355	640.760	696.610	100,00	100,00	124,82	47,92	48,29	1,41	0,16	Biro Umum dan Biro Kesra
24	41	Program Perbaikan Sistem dan Kearsipan	22.050	22.050	13.669	-	-	22.050	22.050	13.849	13.849	13.549	100,00	100,00	101,32	-	-	(1,00)	(0,39)	Biro Pemerintahan
25	43	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.222.343	2.333.177	2.146.459	2.168.243	4.030.200	1.222.343	1.674.785	1.049.943	2.429.233	3.502.650	100,00	71,78	48,92	112,04	86,91	2,30	1,87	Biro Umum dan Biro Humas.
26	45	Kerjasama Informasi dengan Mas Media	2.114.178	4.478.121	3.948.200	5.000.000	6.550.000	2.114.178	2.669.959	1.808.163	3.617.600	4.509.500	100,00	59,62	45,80	72,35	68,85	2,10	1,13	Biro Umum dan Biro Humas.
27	53	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kapasitas Daerah	70.000	-	378.538	385.000	420.000	70.000	221.450	360.788	116.552	78.408	100,00	-	95,31	30,27	18,67	5,00	0,12	Biro Pemerintahan
28	57	Program Pendidikan Politik Masyarakat	32.000	27.000	27.000	50.000	75.000	32.000	27.000	32.000	-	-	100,00	100,00	118,52	-	-	1,34	(1,00)	Biro Kesra
61		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	144.232	126.382	107.050	258.231	284.054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97	-	Biro Kerjasama
62		Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintah	-	-	54.563	176.799	234.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Kerjasama
29	66	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	31.000	19.000	20.000	50.000	65.000	31.000	19.000	27.500	-	-	100,00	100,00	137,50	-	-	1,10	(1,00)	Biro Kesra
30	69	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100.025	41.000	60.000	145.000	75.000	100.025	41.000	65.000	79.000	30.000	100,00	100,00	108,33	54,48	40,00	(0,25)	(0,70)	Biro Kesra
31	76	Program Peningkatan Iman dan Takwa (IMTAQ)	348.263	491.206	1.589.649	625.000	800.000	348.263	491.206	1.524.579	945.153	375.000	100,00	100,00	95,91	151,22	46,88	1,30	0,08	Biro Organisasi dan Biro Kesra
32	78	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	61.250	543.519	727.159	795.000	830.000	61.250	45.350	67.800	1.125.001	832.164	100,00	8,34	9,32	141,51	100,26	12,55	12,59	Biro Ekonomi dan Biro Kesra
33	79	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur dan Pengawasan	-	673.756	215.847	656.826	719.356	-	-	-	643.097	497.950	-	-	-	97,91	69,22	0,07	-	Biro Ekonomi
34	80	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	700.786	751.921	636.242	925.000	950.000	-	-	-	915.120	11.573	-	-	-	98,93	1,22	0,36	-	Biro Ekonomi
35	81	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	66.000	430.496	443.614	550.000	600.000	66.000	49.000	34.000	219.163	183.672	100,00	11,38	7,66	39,85	30,61	8,09	1,78	Biro Ekonomi dan Biro Kesra
36	82	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS	292.828	398.950	497.000	550.000	580.000	292.828	398.950	512.170	516.020	300.000	100,00	100,00	103,05	93,82	51,72	0,98	0,02	Biro Kesra
37	83	Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian	-	553.715	591.726	705.000	850.000	-	-	-	801.602	317.152	-	-	-	113,70	37,31	0,54	-	Biro Ekonomi
38	85	Penertiban pengelolaan keuangan dan asset	-	221.450	20.700	25.000	30.000	-	-	20.700	11.100	11.100	-	-	100,00	44,40	37,00	(0,86)	(0,46)	Biro Pemerintahan
39	86	Program Kerjasama Pembangunan	395.340	432.625	303.607	397.092	436.799	272.215	315.175	-	774.263	702.678	68,86	72,85	-	194,98	160,87	0,10	1,58	Biro AP & LPBJP
40	87	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah (Peningkatan Pelayanan Publik)	269.000	642.013	320.000	350.000	400.000	269.000	642.013	320.000	413.522	444.500	100,00	100,00	100,00	118,15	111,13	0,49	0,65	Biro Organisasi
41	88	Program Evaluasi Kinerja SKPD	-	-	-	445.000	350.000	-	-	-	130.945	100.000	-	-	-	29,43	28,57	(0,21)	(0,24)	Biro Organisasi
42		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	53.400	88.735	97.376	115.000	120.000	53.400					100,00	-	-	-	-	1,25	(1,00)	Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Biro Ekonomi, Biro AP & LPBJP, Biro Kesra dan Biro Humas.

2.4 Peluang dan Tantangan

Peluang dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi selalu muncul, sehingga bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, peluang-peluang tersebut antara lain adalah :

1. Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mencukupi;
2. Komitmen pimpinan;
3. Adanya kebijakan pemerintah dalam mengembangkan good governance;
4. Adanya kebijakan Pemerintah untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Sarana dan Prasarana yang tersedia.

Sedangkan tantangan / hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang masih rendah;
2. Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah;
3. Tuntutan pelayanan birokrasi menghendaki aparatur yang semakin profesional dan kompeten;
4. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien;
5. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
6. Efisiensi, efektifitas dan produktivitas belum optimal;
7. Transparansi dan akuntabilitas birokrasi masih rendah;
8. Disiplin dan kinerja aparatur masih rendah;
9. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang harus menjadi tujuan perbaikan, antara lain :

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Etos dan disiplin kerja sumber daya aparatur yang efisien dan efektif belum membudaya;
4. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan;
5. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata;
6. Sistem penilaian dan pengukuran kinerja dalam penerapan reward and *punishment* belum optimal;
7. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum optimal.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Beberapa isu strategis diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, setidaknya sampai dengan tahun 2023. Isu strategis tersebut akan digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi dan untuk memberikan arah bagi perumusan berbagai program kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun-tahun mendatang.

Dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

1. Proses pelelangan pengadaan barang jasa masih kurang efektif (lambat).
2. Penataan daerah dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan belum optimal

3. Pelaksanaan layanan publik dan reformasi birokrasi belum optimal.
4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur belum optimal.
5. Perjanjian Kerjasama pemerintahan maupun non pemerintahan belum optimal
6. Penyebarluasan informasi, tata kelola dokumentasi kehumasan, sumber daya aparatur dan sarana prasarana penunjang keprotokolan belum optimal
7. Kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial masih tinggi.
8. Penyelesaian permasalahan hukum belum efektif dan efisien

3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan tugas dan fungsi harus dikaitkan dengan visi dan misi serta program Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tahap ke-empat dalam dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025. Dengan mempertimbangkan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagaimana diuraikan berikut ini.

3.2.1. Visi

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah: **“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”** Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna :

- Satu keyakinan bahwa NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional.
- Satu komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtiarkan untuk mewujudkan NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian

menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

3.2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur penunjang sektor unggulan serta konektivitas wilayah;
2. NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;
3. NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;
4. NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;
6. NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dari ke enam misi tersebut yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi NTB.dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan RPJMD 2019-2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Penanggung Jawab
NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.	Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Setda Prov. NTB (Biro Organisasi)
			Program Evaluasi Kinerja SKPD	Setda Prov. NTB (Biro Organisasi)
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Setda Prov. NTB (Biro Pemerintahan)
			Program pengembangan sistem analisis formasi jabatan dan pendayagunaan aparatur	Setda Prov. NTB (Biro Organisasi)
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Setda Prov. NTB (Biro Administrasi Kerjasama)
			Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	Setda Prov. NTB (Biro Administrasi Kerjasama)
			Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	Setda Prov. NTB (Biro Administrasi Kerjasama)
			Program Pengendalian Kerjasama Daerah	Setda Prov. NTB (Biro Administrasi Kerjasama)
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Setda Prov. NTB (Biro Ekonomi)

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Penanggung Jawab
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Setda Prov. NTB (Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Setda Prov. NTB (Biro Organisasi)
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Setda Prov. NTB (Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP)
NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkeadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat, dan Iklim Demokrasi	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Setda Prov. NTB (Biro Kesejahteraan Rakyat)
		Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Setda Prov. NTB (Biro Hukum)
			Program Bantuan Hukum dan HAM	Setda Prov. NTB (Biro Hukum)

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat berdasarkan tugas dan fungsinya menetapkan, tujuan, dan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat
4. Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan
5. Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat, dan Iklim Demokrasi
6. Meningkatnya kualitas dan penegakan produk hukum daerah

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mempunyai beberapa sasaran yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
2. Terwujudnya pelaporan bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan.
3. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel
4. Terwujudnya ASN sesuai kebutuhan, kompetensi dan kualitas.
5. Terwujudnya Kerjasama Daerah.
6. Terlaksananya Evaluasi Kerjasama Daerah.
7. Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan.
8. Terwujudnya pelayanan publik yang mudah, cepat dan tepat.
9. Terwujudnya penyebaran informasi yang cepat, akurat dan berkesinambungan.

10. Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel
11. Terlaksananya pelayanan tamu pimpinan yang berkualitas.
12. Terlaksananya pengembangan investasi.
13. Tertanamnya nilai Keagamaan, Sosial budaya dan toleransi di masyarakat.
14. Meningkatnya produk hukum daerah yang terbentuk

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Peanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Nilai SAKIP	B	BB	BB	A	A	
		1. Terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase laporan kinerja pemerintah yang bernilai A / BB	50	75	100	100	100	Setda Prov. NTB (Biro Organisasi)
			Persentase Perangkat Daerah yang akuntabel	22,22	40	60	77,77	100	Setda Prov. NTB (Biro Organisasi)
		2. Terwujudnya pelaporan bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan	Rangking LPPD	100	100	100	100	100	Setda Prov. NTB (Biro Pemerintahan)
		3. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel	Niai LAKIP	B	BB	BB	BB	A	Setda Prov. NTB (Biro Umum)
			Indek Profesionalisme ASN	0,65	0,67	0,70	0,73	0,75	
		4. Terwujudnya ASN sesuai kebutuhan, kompetensi dan kualitas	Persentase dokumen pendayagunaan aparatur yang tersusun	100	100	100	100	100	Setda Prov. NTB (Biro Organisasi)
			Persentase Kerjasama Daerah	100	100	100	100	100	Setda Prov. NTB (Biro Administrasi Kerjasama)
		5. Terwujudnya Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Pemerintahan dan Non Pemerintahan yang terjalin	100 (34)	0	0	0	0	Setda Prov. NTB (Biro Administrasi Kerjasama)
			Persentase Kerjasama Pemerintahan yang terjalin	0	100 (38)	100 (49)	100 (58)	100 (62)	Setda Prov. NTB (Biro Administrasi Kerjasama)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Peanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	
		6. Terlaksananya evaluasi kerjasama daerah.	Persentase Kerjasama Non Pemerintahan yang terjalin	0	100	100	100	100	Setda Prov. NTB (Biro Administrasi Kerjasama)
			Persentase Kerjasama Daerah yang terevaluasi	0	100	100	100	100	Setda Prov. NTB (Biro Administrasi Kerjasama)
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran		Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan (%)	100	100	100	100	100	
		7. Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan	Tingkat kepatuhan OPD terhadap standar harga	76	82	87	93	98	Setda Prov. NTB (Biro APP dan LPBJP)
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Indeks Pelayanan Publik	97,78	97,87	97,97	98,07	98,17	
		8. Terwujudnya pelayanan publik yang mudah, cepat dan tepat	Jumlah Unit Kerja Pelayanan publik yang berprestasi	9	15	21	27	34	Setda Prov. NTB (Biro Organisasi)
			Persentase Unit Kerja Pelayanan publik yang survey kepuasan masyarakat meningkat	60	80	100	100	100	Setda Prov. NTB (Biro Organisasi)
		9. Terwujudnya penyebaran informasi yang cepat, akurat dan berkesinambungan	Persentase Kerjasama Informasi dan Media Massa	90	90	92	94	97	Setda Prov. NTB (Biro Humas)
		10. Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	3	3	4	4	4	Setda Prov. NTB (Biro APP dan LPBJP)
			Prosentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan sesuai Standar (17 Std)	100	100	100	100	100	Setda Prov. NTB (Biro APP dan LPBJP)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Peanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	
		11.Terlaksananya Pelayanan Tamu Pimpinan yang berkualitas	Persentase Pelayanan Fasilitas Kegiatan Pimpinan (%)	100	100	100	100	100	Setda Prov. NTB (Biro Umum)
4.	Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan		Nilai Realisasi Investasi (Rp. Milyar)	16.000	16.800	17.640	18.522	19.448	
		12.Terlaksananya pengembangan investasi	Tersedianya Data dan rekomendasi hasil kajian pengembangan investasi (kajian)	4	4	4	4	4	Setda Prov. NTB (Biro Perekonomian)
5.	Menanamkan nilai sosial budaya dan toleransi masyarakat dan iklim demokrasi		Indeks Kriminalitas	17,25	16,45	15,65	15,85	14,65	
		13.Tertanamnya nilai Keagamaan, Sosial budaya dan toleransi di masyarakat	Prosentase Pelaksanaan kegiatan Keagamaan (%)	100	100	100	100	100	Setda Prov. NTB (Biro Kesra)
6.	Meningkatnya kualitas dan penegakan produk hukum daerah		Persentase Produk Hukum Daerah yang berkualitas	100	100	100	100	100	
		14. Meningkatnya produk hukum daerah yang terbentuk	Persentase Produk Hukum Daerah yang berkualitas	100	100	100	100	100	Setda Prov. NTB (Biro Hukum)
			Persentase penanganan kasus-kasus hukum	100	100	100	100	100	Setda Prov. NTB (Biro Hukum)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program.

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengembangan kapasitas pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (RPJMD) Tahun 2019-2023, maka untuk mewujudkan koordinasi, pembinaan dan pelayanan yang profesional, Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat menetapkan strategi dan kebijakan sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 5.1

Strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023

No.	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
Sasaran 1 Terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran						
1.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja
Sasaran 2 Terwujudnya pelaporan bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan.						
2.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata laksana Pemerintahan	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata laksana Pemerintahan	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata laksana Pemerintahan	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata laksana Pemerintahan	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata laksana Pemerintahan
Sasaran 3 Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel						
3.	Peningkatan standarisasi Pelayanan sesuai SOP Pelayanan Tamu Pimpinan	Meningkatkan kualitas Pelayanan kerumahtanggaan melalui penerapan Standar dan sistem pelayanan yang inovatif.	Meningkatkan kualitas Pelayanan kerumahtanggaan melalui penerapan Standar dan sistem pelayanan yang inovatif.	Meningkatkan kualitas Pelayanan kerumahtanggaan melalui penerapan Standar dan sistem pelayanan yang inovatif.	Meningkatkan kualitas Pelayanan kerumahtanggaan melalui penerapan Standar dan sistem pelayanan yang inovatif.	Meningkatkan kualitas Pelayanan kerumahtanggaan melalui penerapan Standar dan sistem pelayanan yang inovatif.
Sasaran 4 Terwujudnya ASN sesuai kebutuhan,kompetensi dan kualitas.						
4.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja

No.	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
Sasaran 5 Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan						
5.	Peningkatan kualitas perencanaan	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan sebagai basis perencanaan dan penganggaran selanjutnya	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan sebagai basis perencanaan dan penganggaran selanjutnya	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan sebagai basis perencanaan dan penganggaran selanjutnya	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan sebagai basis perencanaan dan penganggaran selanjutnya	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan sebagai basis perencanaan dan penganggaran selanjutnya
Sasaran 6 Terwujudnya pelayanan publik yang mudah, cepat dan tepat						
6.	Peningkatan standarisasi Pelayanan Pada Unit Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan public
Sasaran 7 Terwujudnya penyebarab informasi yang cepat, akurat dan berkesinambungan						
7.	Peningkatan kualitas layanan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan
		Memanfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik	Memanfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik	Memanfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik	Memanfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik	Memanfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik

No.	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
Sasaran 8 Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel						
8.	Peningkatan kualitas layanan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Memanfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik	Memanfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik	Memanfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik	Memanfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik	Memanfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik
Sasaran 9 Terwujudnya Kerjasama Daerah						
9.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan	Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan	Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan	Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan	Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan
Sasaran 10 Terlaksananya Pelayanan Tamu Pimpinan yang berkualitas						
10.	Peningkatan standarisasi Pelayanan sesuai SOP Pelayanan Tamu Pimpinan	Meningkatkan kualitas Pelayanan kerumahtanggaan melalui penerapan Standar dan sistem pelayanan yang inovatif.	Meningkatkan kualitas Pelayanan kerumahtanggaan melalui penerapan Standar dan sistem pelayanan yang inovatif.	Meningkatkan kualitas Pelayanan kerumahtanggaan melalui penerapan Standar dan sistem pelayanan yang inovatif.	Meningkatkan kualitas Pelayanan kerumahtanggaan melalui penerapan Standar dan sistem pelayanan yang inovatif.	Meningkatkan kualitas Pelayanan kerumahtanggaan melalui penerapan Standar dan sistem pelayanan yang inovatif.
Sasaran 11 Terlaksananya pengembangan investasi.						
11.	Optimalisasi manfaat destinasi unggulan dan	Meningkatkan Investasi, kerjasama pemerintah	Meningkatkan Investasi, kerjasama	Meningkatkan Investasi, kerjasama	Meningkatkan Investasi, kerjasama	Meningkatkan Investasi, kerjasama

No.	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
	kawasan strategis (Mandalika dan SAMOTA, dll.) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan
Sasaran 12 Terkendalinya laju inflasi						
12.	Peningkatkan daya beli masyarakat	Meningkatkan daya beli masyarakat	Meningkatkan daya beli masyarakat	Meningkatkan daya beli masyarakat	Meningkatkan daya beli masyarakat	Meningkatkan daya beli masyarakat
Sasaran 13 Tertanamnya nilai Keagamaan, Sosial budaya dan toleransi di masyarakat						
13.	Pembinaan lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan	Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan dalam pembentukan karakter masyarakat	Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan dalam pembentukan karakter masyarakat	Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan dalam pembentukan karakter masyarakat	Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan dalam pembentukan karakter masyarakat	Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan dalam pembentukan karakter masyarakat
Sasaran 14 Terbentuknya Produk-produk Hukum Daerah						
14.	Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum	Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah	Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah	Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah	Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah	Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah

Tabel 5.2
Kaitan antara Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja
	Terwujudnya pelaporan bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata laksana Pemerintahan
	Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel	Peningkatan standarisasi Pelayanan sesuai SOP Pelayanan Tamu Pimpinan	Meningkatkan kualitas Pelayanan kerumahaan melalui penerapan Standar dan sistem pelayanan yang inovatif.
	Terwujudnya ASN sesuai kebutuhan, kompetensi dan kualitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja
	Terwujudnya Kerjasama Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan.
Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan	Peningkatan kualitas perencanaan	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan sebagai basis perencanaan dan penganggaran selanjutnya
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Terwujudnya pelayanan publik yang mudah, cepat dan tepat	Peningkatan standarisasi Pelayanan Pada Unit Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan public
	Terwujudnya penyebarab informasi yang cepat, akurat dan berkesinambungan	Peningkatan kualitas layanan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan
			Memfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	Peningkatan kualitas layanan melalui pengembangn kelembagaan SDM dan pemanfaatan Teknologi Informasi	Memanfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik
	Terwujudnya Kerjasama Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan
	Terlaksananya Pelayanan Tamu Pimpinan yang berkualitas	Peningkatan standarisasi Pelayanan sesuai SOP Pelayanan Tamu Pimpinan	Meningkatkan kualitas Pelayanan kerumahtanggaan melalui penerapan Standar dan sistem pelayanan yang inovatif.
Meningkatnya investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha serta kemudahan perizinan	Terlaksananya pengembangan investasi.	Optimalisasi manfaat destinasi unggulan dan kawasan strategis (Mandalika dan SAMOTA, dll.) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan
Meningkatnya daya beli masyarakat	Terkendalnya laju inflasi	Peningkatan Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan daya beli masyarakat
Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat, dan Iklim Demorasi	Tertanamnya nilai Keagamaan, Sosial budaya dan toleransi di masyarakat	Pembinaan lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan	Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan dalam pembentukan karakter masyarakat
Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah	Terbentuknya Produk-produk Hukum Daerah	Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum	Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mencermati tabel kebijakan umum dan program prioritas RPJMD 2019-2023, dirumuskan ada 9 (sembilan) prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari 9 (sembilan) Prioritas pembangunan tersebut, yang berkaitan langsung dengan tugas fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

1. Budi Pekerti Luhur
2. Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana program ditetapkan rencana capaian kinerja, terutama untuk Sasaran Program (*outcome*) dan sasaran kegiatan (*output*) dimana penyusunan program dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Berdasarkan tujuan, sasaran, Strategi dan arah kebijakan pembangunan tersebut di atas, program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023, sebagaimana tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Setda Provinsi NTB
yang mengacu pada pencapaian Target Kineja RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya									
									2019		2020		2021		2022		2023	
									2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume
4					URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG													
4 01					ADMINISTRASI PEMERINTAHAN													
4 01	03				SEKRETARIAT DAERAH													
					BIRO PEMERINTAHAN													
4 01	03	33			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rangking LPPD			560.890.050	591.422.686	629.662.997	667.331.005	700.756.682					
4 01	03	33 01			Penyusunan LPPD Gubernur	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	1	335.400.000	1	352.423.000	1	372.663.000	1	420.000.000			
4 01	03	33 02			Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daerah	Frekuensi koordinasi	kali	1	98.730.000	1	103.999.686	1	117.000.997	1	129.975.682			
4 01	03	33 03			Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Prov. NTB	Jumlah dokumen informasi yang diinformasikan kepada masyarakat	dokumen	1	126.760.050	1	135.000.000	1	139.999.000	1	150.781.000			
					BIRO HUKUM													
4 01	03	26			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk			1.167.846.880	1.231.422.980	1.311.044.680	1.389.474.580	1.459.068.340					
4 01	03	26 02			0Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang terbentuk	Perda/SK/Pergub	740	598.697.000	740	630.699.780	740	669.700.000	740	762.696.540			
4 01	03	26 06			Kajian peraturan perundang	Terfasilitasi dan Terevaluasinya Produk Hukum Daerah	Perda/ Perbup/ Perwal	120	371.499.960	120	406.500.000	120	426.500.040	120	446.499.960			
4 01	03	26 8			Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	Tersosialisasinya Produk Hukum Daerah	Perda/ Pergub/ Peserta	160	197.649.920	160	194.223.200	160	214.844.640	160	249.871.840			
4 01	03	28			Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase penanganan kasus-kasus hukum			574.360.044	675.629.940	719.314.940	762.346.148	800.531.004					
4 01	03	28 02			Rencana Aksi Ham & HAKI	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Rakor	Peserta	120	129.260.040	120	144.300.000	120	156.054.000	120	180.330.960			
4 01	03	28 03			Penyelesaian Sengketa Hukum di Pengadilan	Jumlah Penyelesaian Kasus/sengketa Hukum litigasi	Perkara	4	321.800.004	4	333.523.940	4	356.410.940	4	380.410.940			
4 01	03	28 04			Penyelesaian Permasalahan	Jumlah Penyelesaian Kasus/sengketa Hukum non Litigasi Penda	Perkara	1	86.790.000	4	86.806.000	4	86.850.000	4	99.789.104			
4 01	03	28 05			Pengkajian Naskah MoU & Perjanjian Kerjasama	Jumlah Penyelesaian MoU dan Perjanjian Kerjasama	Naskah	20	36.510.000	20	111.000.000	20	120.000.000	20	140.000.000			

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya										
									2019		2020		2021		2022		2023		
									2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran
4	01	03	20	34	Pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah	jumlah pembinaan	kali			1	22.790.000	5	110.290.000	6	121.319.000	6	190.000.000	6	215.000.000
4	01	03	20	35	Pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	jumlah sistem elektronik	sistem			2	12.014.000	2	62.014.000	3	68.215.000	3	125.000.000	3	145.000.000
					BIRO KERJASAMA														
4	01	03	61		Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	Persentase Kerjasama Pemerintahan yang terjalin	%				0		878.000.000		948.240.000		1.024.099.000		1.106.026.999
4	01	03	61	01	Pengembangan dan Penataan Kerjasama Pemerintahan antar Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama pemerintahan antar daerah kab/kota	Dok			0	10		156.000.000	12	168.480.000	14	181.958.400	16	196.515.072
4	01	03	61	02	Pengembangan dan Penataan Kerjasama Pemerintahan antar Daerah Provinsi	Jumlah kerjasama pemerintahan antar daerah provinsi	Dok			0	5		244.000.000	8	263.520.000	10	284.601.600	12	307.369.728
4	01	03	61	03	Pengembangan dan Penataan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri	Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri	Dok			0	4		478.000.000	5	516.240.000	6	557.539.000	7	602.142.199
4	01	03	62		Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	Persentase Kerjasama Non Pemerintahan yang terjalin	%				0		888.000.000		959.040.000		1.035.763.000		1.118.623.997
4	01	03	62	01	Pengembangan dan Penataan Kerjasama Non Pemerintahan antar Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama non pemerintahan antar daerah kab/kota	Dok			0	10		166.000.000	12	179.280.000	15	194.205.600	15	209.742.048
4	01	03	62	02	Pengembangan dan Penataan Kerjasama Non Pemerintahan antar Daerah Provinsi	Jumlah kerjasama non pemerintahan antar daerah provinsi	Dok			0	5		144.000.000	8	155.520.000	10	167.961.600	10	181.398.528
4	01	03	62	03	Pengembangan dan Penataan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri	Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga di luar negeri	Dok			0	4		578.000.000	5	624.240.000	6	673.595.800	7	727.483.421
4	01	03	63		Program Pengendalian Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang Terevaluasi	%				0		1.375.200.000		1.485.216.000		1.604.033.000		1.732.356.000
4	01	03	63	01	Pengendalian dan Evahuasi Kerjasama Pemerintahan	Jumlah pengendalian dan evaluasi kerjasama pemerintahan	Dok			0	19		940.350.000	25	1.015.578.000	30	1.096.824.240	35	1.184.570.179
4	01	03	63	02	Pengendalian dan Evahuasi Kerjasama Non Pemerintahan	Jumlah pengendalian dan evaluasi kerjasama non pemerintahan	Dok			0	19		434.850.000	25	469.638.000	31	507.208.760	32	547.785.821

Tabel 6.2
Rencana Program , Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Setda Provinsi NTB
yang mengacu pada Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023

Kode				Program	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya								Penggang Jawab						
								2019		2020		2021		2022			2023					
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume		Anggaran	Volume	Anggaran			
				SEKRETARIAT DAERAH					72.389.624.332			85.954.517.407			89.717.277.981			95.811.047.144			102.324.600.226	
401	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	21.448.078.663	100	22.135.818.361	100	23.326.057.971	100	24.713.197.596	100	26.120.250.404	Biro Permerintahan, Biro Hukum, Biro Kesra, Biro Ekonomi, Biro APP & LPBJP, Biro Administrasi Kerjasama, Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Humas dan Protokol.					
401	03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana aparatur	%	100	100	10.319.994.777	100	12.672.358.472	100	12.369.992.118	100	13.098.110.713	100	14.543.804.293	Biro Permerintahan, Biro Hukum, Biro Kesra, Biro Ekonomi, Biro APP & LPBJP, BiroKerjasama, Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Humas dan Protokol.					
401	03	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presetase Peningkatan Disiplin ASN	%	100		0	100	100.000.000	100	103.590.000	100	107.309.000	100	263.161.000	Biro Kesra dan Biro Umum					
401	03	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presetase Peningkatan IPTEK Aparatur	%	100		611.955.000	100	746.566.870	100	784.333.599	100	826.533.288	100	864.702.619	Biro Kesra, Biro Ekonomi, Biro APP & LPBJP, Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Humas dan Protokol.					
401	03	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	B	B		1.213.678.980	B	1.482.122.913	B	1.546.868.140	BB	1.634.003.443	BB	1.712.007.675	Biro Permerintahan, Biro Hukum, Biro Kesra, Biro Ekonomi, Biro APP & LPBJP, BiroKerjasama, Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Humas dan Protokol.					
401	03	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen		12	489.126.700	12	523.846.278	12	557.622.526	12	590.159.168	12	621.436.713	Biro Permerintahan, Biro Hukum, Biro Kesra, Biro Ekonomi, Biro APP & LPBJP, BiroKerjasama, Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Humas dan Protokol.					
401	03	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	%	100	100	9.579.752.800	100	10.101.236.994	100	10.747.159.093	100	11.387.809.363	100	11.965.648.075	Biro Umum dan Biro Humas					
401	03	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kontribusi hasil BUMD terhadap PAD	%	100	100	519.200.889	100	547.464.253	100	581.032.188	100	615.790.983	100	646.635.096	Biro Ekonomi dan Biro APP & LPBJP					
401	03	19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Unit Kerja Pelayanan publik yang berprestasi ; Persentase Unit Kerja Pelayanan publik yang survey kepuasan masyarakat meningkat				228.366.999		240.798.390		256.367.979		271.704.552		285.313.833	Biro Organisasi					
401	03	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Kematangan UKPBJ				2.476.568.000		3.447.121.000		3.980.725.000		4.992.140.000		5.739.104.000	Biro APP dan LPBJP					
401	03	21	Program Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabel	%			59.862.690		63.121.365		67.202.685		71.222.895		0	Biro Organisasi					
401	03	22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur dan Pengawasan	Cakupan Perda/Pergub pengelola BUMD				197.259.700		207.997.900		220.534.897		233.727.835		245.434.937	Biro Ekonomi					
401	03	23	Program Pengembangan Sistem Analisis Formasi Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	persentase dokumen pendayagunaan aparatur yang tersusun	%			299.999.952		316.330.814		336.784.146		356.931.406		374.809.650	Biro Organisasi					
401	03	24	Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	persentase laporan kinerja pemerintah yang bernilai A / BB	%			223.660.300		235.835.480		251.084.172		266.104.652		279.433.464	Biro Organisasi					
401	03	25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	cakupan fasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah				236.000.000		248.846.000		264.936.000		280.786.000		294.850.000	Biro Pemerintahan					
401	03	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk	%			1.167.846.880		1.231.422.980		1.311.044.680		1.389.474.580		1.459.068.340	Biro Hukum					
401	03	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase perangkat daerah / UPTD/UPTB yang ditata	%			1.665.066.820		1.755.656.000		1.869.068.000		1.980.835.000		2.079.987.000	Biro Pemerintahan dan Biro Organisasi					
401	03	28	Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase penanganan kasus-kasus hukum	%			574.360.044		675.629.940		719.314.940		762.346.148		800.531.004	Biro Hukum					
401	03	30	Program Reformasi Ketatalaksanaan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SOP secara baik	%			61.600.000		64.953.260		69.153.019		73.289.925		76.960.915	Biro Organisasi					

Kode			Program	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya								Penggang Jawab		
							2019		2020		2021		2022			2023	
							2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume		Anggaran	Volume
401	03	31	Program Peningkatan Budaya Kerja	Persentase perangkat daerah yang menerapkan budaya kerja baik	%			46.885.000		49.437.232		52.633.754		55.782.436		58.576.500	Biro Organisasi
401	03	32	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Tingkat meningkatnya kualitas kinerja kecamatan dan kelurahan				72.366.000		76.305.319		81.239.081		86.099.006		90.411.584	Biro Pemerintahan
401	03	33	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rangking LPPD				560.890.050		591.422.686		629.662.997		667.331.005		700.756.682	Biro Pemerintahan
401	03	34	Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah	Persentase peningkatan produksi daerah	%			705.000.000		713.377.000		756.375.000		801.524.000		841.756.000	Biro Ekonomi
401	03	35	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi				175.735.000		185.301.200		196.470.000		208.223.000		218.653.000	Biro Ekonomi
401	03	36	Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian	Cakupan rekomendasi kebijakan ekonomi yang ditindaklanjuti				171.145.000		180.466.700		191.344.000		202.790.800		212.948.000	Biro Ekonomi
401	03	40	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Prosentase Pelaksanaan kegiatan Keagamaan	%			6.598.592.500		6.657.794.000		6.896.809.000		7.144.404.000		7.400.888.000	Biro Kesra
401	03	41	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	%			169.570.500		178.801.000		185.220.000		191.870.000		198.758.000	Biro Kesra
401	03	42	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Sekolah yang bisa mengikuti LSS	%			0		175.000.000		181.283.000		187.791.000		194.532.000	Biro Kesra
401	03	43	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG	%			104.870.000		108.579.000		112.477.000		116.515.000		120.697.000	Biro Kesra
401	03	44	Program Pengendalian Penduduk dan KB	Rasio Akseptor KB dan Penduduk				0		90.000.000		93.231.000		96.578.000		100.045.000	Biro Kesra
401	03	45	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Persentase keikutsertaan Pemuda berprestasi	%			311.150.000		318.088.000		329.507.000		341.336.000		353.590.000	Biro Kesra
401	03	46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Cakupan Koordinasi Rumpun Kesra				375.740.000		376.194.000		389.699.000		403.689.000		418.182.000	Biro Kesra
401	03	47	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS	%			30.000.000		31.633.000		32.769.000		33.945.000		35.164.000	Biro Kesra
401	03	48	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) Termasuk HIV/AIDS	Persentase Siswa yang tidak menggunakan Narkoba, HIV/AIDS dan PMS	%			500.000.000		517.218.000		535.786.000		555.021.000		574.946.000	Biro Kesra
401	03	49	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan Koordinasi TKI informal yang mendapat penanganan				27.500.000		28.997.000		30.038.000		31.116.000		32.233.000	Biro Kesra
401	03	51	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Prsentase PKK Desa Aktif				0		59.750.000		61.895.000		64.117.000		66.419.000	Biro Kesra
401	03	52	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Terlaksananya kerjasama Penyebarluasan Informasi dengan Massa media				5.951.553.600		6.275.533.000		6.680.500.000		7.072.000.000		7.425.000.000	Biro Humas
401	03	53	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media				4.950.193.538		5.219.663.000		5.557.155.996		5.889.599.000		6.184.601.000	Biro Humas
401	03	54	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Pemerintahan dan Non Pemerintahan yang terjalin	%			150.000.000		0	0	0	0	0		0	Biro Kerjasama
401	03	61	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	Persentase Kerjasama Pemerintahan yang terjalin	%			0	0	878.000.000	0	948.240.000	0	1.024.099.000	0	1.106.026.999	Biro Kerjasama
401	03	62	Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	Persentase Kerjasama Non Pemerintahan yang terjalin	%			0	0	888.000.000	0	959.040.000	0	1.035.763.000	0	1.118.623.997	Biro Kerjasama
401	03	63	Program Pengendalian Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang Terevaluasi	%			0	0	1.375.200.000	0	1.485.216.000	0	1.604.033.000	0	1.732.356.000	Biro Kerjasama
401	03	56	Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement	Prosentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan sesuai Standar (17 Standar)	%			116.053.950		781.440.000		575.320.000		682.049.350		809.290.450	Biro APP
401	03	58	Program Pengelolaan Kelembagaan IT Pelayanan Publik	Persentase Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%			0		100.000.000		0		0		0	Biro Organisasi
401	03	59	Program Pemenuhan Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik				0		60.000.000		0		0		0	Biro Organisasi
401	03	60	Program Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi				0		99.990.000		0		0		0	Biro Organisasi
401	03	61	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	Persentase Kerjasama Pemerintahan yang terjalin	%			0		878.000.000		948.240.000		1.024.099.000		1.106.026.999	Biro Kerjasama
401	03	62	Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	Persentase Kerjasama Non Pemerintahan yang terjalin	%			0		888.000.000		959.040.000		1.035.763.000		1.118.623.997	Biro Kerjasama
401	03	63	Program Pengendalian Dan Evaluasi Kerjasama	Persentase Kerjasama Daerah yang Terevaluasi	%			0		1.375.200.000		1.485.216.000		1.604.033.000		1.732.356.000	Biro Kerjasama

Tabel 6.3
Rencana Program / Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
Biro-Biro lingkup Setda Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume
					BIRO PEMERINTAHAN				3.139.716.200		3.658.282.631		3.917.953.625		4.184.625.827		4.419.198.479
4	01	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%			582.539.930		614.249.100		653.960.952		693.077.416		727.805.292
4	01	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	surat		250	7.050.000	250	7.000.000	250	7.000.000	250	7.000.000	250	7.000.000
4	01	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	rekening		4	20.000.000	4	20.227.100	4	21.119.752	4	22.270.816	4	23.071.292
4	01	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit		17	123.052.000	17	124.984.000	19	126.996.000	19	128.991.000	21	128.982.000
4	01	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	OB		5	45.788.000	5	46.992.000	5	48.000.000	5	49.992.000	5	51.000.000
4	01	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	buah		23	33.104.200	25	34.992.000	25	36.000.000	25	37.992.000	25	39.000.000
4	01	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	eksemplar		1915	38.292.200	1951	39.995.500	1951	39.995.500	1952	40.992.000	1952	40.992.000
4	01	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	eksemplar		3666	22.000.000	3537	22.990.500	4000	24.000.000	4000	24.000.000	4000	24.000.000
4	01	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	porsi		1095	32.858.120	1200	36.000.000	1233	36.990.000	1266	37.980.000	1300	39.000.000
4	01	03	01	18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	kali		12	142.939.980	12	150.000.000	13	169.999.700	14	189.999.600	14	200.900.000
4	01	03	01	20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	kali		40	103.906.230	40	118.000.000	40	130.000.000	40	140.000.000	40	160.000.000
4	01	03	01	25	Pengelola Kearsipan	berkas		3960	13.549.200	3960	13.068.000	3960	13.860.000	3960	13.860.000	3960	13.860.000
4	01	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%			58.000.000		61.157.286		65.111.595		69.000.000		72.462.971
4	01	03	02	10	Pengadaan mebeleur	Buah		0	0	0	0	0	0	2	15.000.000	0	0
4	01	03	02	11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	unit		2	16.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	0	0	2	14.000.000
4	01	03	02	13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah		0	0	1	7.000.000	1	7.000.000	0	0	0	0
4	01	03	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	unit		42	42.000.000	42	46.157.286	45	50.111.595	45	54.000.000	47	58.462.971
4	01	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	B			140.400.000		148.042.000		157.614.000		167.043.000		175.410.000
4	01	03	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen		4	91.350.000	4	95.000.000	4	100.000.000	4	105.000.000	4	108.000.000

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume
4	01	03	06	05	Penyusunan rencana kerja SKPD	dokumen		4	49.050.000	4	53.042.000	4	57.614.000	4	62.043.000	4	67.410.000
4	01	03	07		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	dokumen			11.000.000		11.704.240		12.461.000		13.206.400		13.867.950
4	01	03	07	01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	dokumen		2	11.000.000	2	11.704.240	2	12.461.000	2	13.206.400	2	13.867.950
4	01	03	25		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				236.000.000		248.846.000		264.936.000		280.786.000		294.850.000
4	01	03	25	01	Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan publik	jenis		2	236.000.000	2	248.846.000	2	264.936.000	2	280.786.000	2	294.850.000
4	01	03	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru				1.267.566.820		1.336.556.000		1.422.968.000		1.508.095.000		1.583.634.000
4	01	03	27	05	Pembentukan daerah otonomi baru Provinsi NTB	DOB		0	0	3	271.566.000	1	121.988.000	3	290.115.000	1	140.654.000
4	01	03	27	06	Penyelesaian administrasi kepala daerah dan DPRD Provinsi NTB dan Kab./Kota se	orang		30	874.078.320	30	549.990.000	30	760.980.000	30	607.980.000	30	802.980.000
4	01	03	27	08	Monitoring pelaksanaan program/kegiatan pusat di daerah	kali		10	48.312.700	10	100.000.000	10	110.000.000	10	130.000.000	10	140.000.000
4	01	03	27	09	Money pelaksanaan trantib, Linmas dan Kebencanaan	kali		10	66.075.800	10	125.000.000	10	130.000.000	10	150.000.000	10	160.000.000
4	01	03	27	10	Money pelaksanaan penegasan batas daerah, Dt. Wilayah	kali		10	279.100.000	10	290.000.000	10	300.000.000	10	330.000.000	10	340.000.000
4	01	03	32		Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa				72.366.000		76.305.319		81.239.081		86.099.006		90.411.584
4	01	03	32	01	Pembinaan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan/Desa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01	03	32	02	Pembinaan Penataan Daerah	dokumen		1	72.366.000	1	76.305.319	1	81.239.081	1	86.099.006	1	90.411.584
4	01	03	32	03	Lomba Kinerja dan Inovasi Kecamatan	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01	03	33		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan				560.890.050		591.422.686		629.662.997		667.331.005		700.756.682
4	01	03	33	01	Penyusunan LPPD Gubernur	dokumen		1	335.400.000	1	352.423.000	1	372.663.000	1	398.331.000	1	420.000.000
4	01	03	33	02	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daerah	kali		1	98.730.000	1	103.999.686	1	117.000.997	1	124.000.005	1	129.975.682
4	01	03	33	03	Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Prov. NTB	dokumen		1	126.760.050	1	135.000.000	1	139.999.000	1	145.000.000	1	150.781.000
2.04	4.01	03	19		Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan.	%	100	100	210.953.400	100	570.000.000	100	630.000.000	100	699.988.000	100	760.000.000

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya										
								2019		2020		2021		2022		2023		
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran
2.04	4.01	03	19		Monitoring dan evaluasi administrasi pertanahan.	Kali	18	18	68.490.000	20	130.000.000	20	150.000.000	22	174.988.000	24	195.000.000	
2.04	4.01	03	19		Penyelesaiab konflik pertanahan dan tanah bermasalah.	Kasus	3	3	72.641.400	5	240.000.000	5	260.000.000	5	285.000.000	5	305.000.000	
2.04	4.01	03	19		Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tanah terlantar	Kali	18	18	69.822.000	25	200.000.000	25	220.000.000	25	240.000.000	26	260.000.000	
									0		0		0		0			0
					BIRO HUKUM				2.539.064.335		2.747.342.341		2.924.980.698		3.099.960.288			3.255.229.857
4 01	03	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%			530.450.906		559.375.112		595.543.283		631.170.168			662.784.599
4 01	03	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	surat		278	9.996.046	278	10.000.216	278	10.000.216	281	10.000.228	281		10.000.228
4 01	03	01	02	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening		12	15.999.996	12	17.000.004	12	17.000.004	12	19.999.992	12		19.999.992
4 01	03	01	07	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	OB		60	45.084.000	60	58.584.000	60	58.584.000	60	58.584.000	60		58.584.000
4 01	03	01	10	10	Penyediaan alat tulis kantor	buah		25	70.850.900	25	66.600.000	25	66.600.000	25	66.600.000	25		66.600.000
4 01	03	01	11	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Eksemplar		11250	33.750.000	11290	34.999.000	11290	34.999.000	11290	34.999.000	11290		34.999.000
4 01	03	01	15	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Eksemplar		72	11.100.024	72	11.999.952	72	17.167.968	72	16.999.992	72		18.613.944
4 01	03	01	17	17	Penyediaan makanan dan minuman	Porsi		624	42.120.000	624	42.120.000	624	42.120.000	624	42.120.000	624		42.120.000
4 01	03	01	18	18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	OT		15	131.841.000	13	115.490.999	15	135.490.020	16	145.490.096	17		165.491.005
4 01	03	01	19	19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	OB		1	39.200.000	3	100.700.013	3	100.700.409	3	116.064.360	3		115.751.430
4 01	03	01	20	20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	OT		30	130.508.940	32	101.880.928	34	112.881.666	35	120.312.500	38		130.625.000
4 01	03	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				178.506.505		188.229.382		200.400.028		212.388.476			223.026.687
4 01	03	02	13	13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit		3	10.500.000	1	14.000.000	3	24.000.000	3	31.987.998	5		42.626.000
4 01	03	02	24	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit		15	125.512.005	18	131.729.004	18	133.900.002	18	137.899.998	18		137.899.998
4 01	03	02	30	30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	unit		37	42.494.500	38	42.500.378	41	42.500.026	44	42.500.480	49		42.500.689
4 01	03	06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				75.000.000		79.082.703		84.196.047		89.232.864			93.702.413
4 01	03	06	01	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dok		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1		15.000.000
4 01	03	06	04	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dok		1	15.000.000	1	19.082.703	1	24.196.647	1	29.232.864	1		33.702.413
4 01	03	06	05	05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Dok		3	45.000.000	3	45.000.000	3	44.999.400	3	45.000.000	3		45.000.000

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume
4	01	03	07		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah				12.900.000		13.602.224		14.481.720		15.348.052	16.116.814	
4	01	03	01	01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Dok	2	12.900.000	2	13.602.224	2	14.481.720	2	15.348.052	2	16.116.814	
4	01	03	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			1.167.846.880		1.231.422.980		1.311.044.680		1.389.474.580		1.459.068.340	
4	01	03	26	02	0Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang	Perda/SK/Pergub	740	598.697.000	740	630.699.780	740	669.700.000	740	708.700.220	740	762.696.540	
4	01	03	26	06	Kajian peraturan perundang	Perda/ Perbup/ Perwal	120	371.499.960	120	406.500.000	120	426.500.040	120	446.499.960	120	446.499.960	
4	01	03	26	8	Penyebearluasan Produk Hukum Daerah	Perda/ Pergub/ Peserta	160	197.649.920	160	194.223.200	160	214.844.640	160	234.274.400	160	249.871.840	
4	01	03	28		Program Bantuan Hukum dan HAM			574.360.044		675.629.940		719.314.940		762.346.148		800.531.004	
4	01	03	28	02	Rencana Aksi Ham & HAKI	Peserta	120	129.260.040	120	144.300.000	120	156.054.000	120	170.145.960	120	180.330.960	
4	01	03	28	03	Penyelesaian Sengketa Hukum di Pengadilan	Perkara	4	321.800.004	4	333.523.940	4	356.410.940	4	368.410.940	4	380.410.940	
4	01	03	28	04	Penyelesaian Permasalahan	Perkara	1	86.790.000	4	86.806.000	4	86.850.000	4	93.789.248	4	99.789.104	
4	01	03	28	05	Pengkajian Naskah MoU & Perjanjian Kerjasama	Naskah	20	36.510.000	20	111.000.000	20	120.000.000	20	130.000.000	20	140.000.000	
								0		0		0		0		0	
					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			8.854.492.000		9.448.746.000		9.787.957.000		10.139.343.000		10.503.343.000	
4	01	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		507.589.000		515.220.000		533.717.000		552.877.000		572.725.000	
4	01	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	
4	01	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
4	01	03	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
4	01	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	OB	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	
4	01	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	buah	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
4	01	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Eksemplar	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	
4	01	03	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	buah	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
4	01	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	eksemplar	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume
4	01	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	OK		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
4	01	03	01	18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	OT		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
4	01	03	01	19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	OB		1	114.000.000	1	114.000.000	1	114.000.000	1	114.000.000	1	114.000.000
4	01	03	01	20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	OT		1	56.089.000	1	63.720.000	1	82.217.000	1	101.377.000	1	121.225.000
4	01	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				107.424.000		110.272.000		114.230.000		118.331.000		122.579.000
4	01	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit		1	107.424.000	1	110.272.000	1	114.230.000	1	118.331.000	1	122.579.000
4	01	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				0		100.000.000		103.590.000		107.309.000		111.161.000
4	01	03	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel		1	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
4	01	03	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari	stel		1	0	1	50.000.000	1	53.590.000	1	57.309.000	1	61.161.000
4	01	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0		52.500.000		54.385.000		56.337.000		58.360.000
4	01	03	05	05	Peningkatan SDM Aparatur	Tahun		1	0	1	52.500.000	1	54.385.000	1	56.337.000	1	58.360.000
4	01	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				107.378.000		113.223.000		117.288.000		121.499.000		125.860.000
4	01	03	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tahun		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
4	01	03	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tahun		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
4	01	03	06	05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tahun		1	57.378.000	1	63.223.000	1	67.288.000	1	71.499.000	1	75.860.000
4	01	03	07		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah				14.678.000		15.477.000		16.033.000		16.608.000		17.204.000
4	01	03	07	01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tahun		1	14.678.000	1	15.477.000	1	16.033.000	1	16.608.000	1	17.204.000
4	01	03	40		Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan				6.598.592.500		6.657.794.000		6.896.809.000		7.144.404.000		7.400.888.000
4	01	03	40	01	Peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI)	Tahun		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
4	01	03	40	02	Penguatan Pelaksanaan Embarkasi Haji NTB	Tahun		1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume
4	01	03	40	03	Pelaksanaan STQ/MTQ Provinsi/Nasional	Tahun		1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000
4	01	03	40	04	Diklat Pengelolaan Manajemen Masjid	Tahun		1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000
4	01	03	40	05	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	Tahun		1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000
4	01	03	40	06	Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Kerukunan Umat Beragama / FKUB	Tahun		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
4	01	03	40	07	Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Keuangan/Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Bidang Keagamaan	Tahun		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
4	01	03	40	08	Pesona Khasanah Ramadhan	Tahun		1	1.098.592.500	1	1.157.794.000	1	1.396.809.000	1	1.644.404.000	1	1.900.888.000
4	01	03	40	18	Peningkatan iman dan taqwa aparatur	Tahun		1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000
4	01	03	41		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				169.570.500		178.801.000		185.220.000		191.870.000		198.758.000
4	01	03	41	01	Penguatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan mewabah	Tahun		1	169.570.500	1	178.801.000	1	185.220.000	1	191.870.000	1	198.758.000
4	01	03	42		Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan				0		175.000.000		181.283.000		187.791.000		194.532.000
4	01	03	42	03	0Penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS)	Tahun		1	0	1	175.000.000	1	181.283.000	1	187.791.000	1	194.532.000
4	01	03	43		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				104.870.000		108.579.000		112.477.000		116.515.000		120.697.000
4	01	03	43	01	Penguatan Upaya Perlindungan Perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	Tahun		1	104.870.000	1	108.579.000	1	112.477.000	1	116.515.000	1	120.697.000
4	01	03	44		Program Pengendalian Penduduk dan KB				0		90.000.000		93.231.000		96.578.000		100.045.000
4	01	03	44	01	Fasilitasi kelompok masyarakat peduli KB	Tahun		1	0	1	90.000	1	93.231.000	1	96.578.000	1	100.045.000
4	01	03	44	19	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	Tahun		1	0	1	89.910.000	1	0	1	0	1	0
4	01	03	45		Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan				311.150.000		318.088.000		329.507.000		341.336.000		353.590.000
4	01	03	45	01	Pemuda Kreatif dan Berprestasi	Tahun		1	311.150.000	1	318.088.000	1	329.507.000	1	341.336.000	1	353.590.000

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume
4 01	03	46			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat					375.740.000		376.194.000		389.699.000		403.689.000	418.182.000
4 01	03	46 01			Pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui Monitoring dan Evaluasi partisipasi masyarakat	Tahun		1	375.740.000	1	376.194.000	1	389.699.000	1	403.689.000	1	418.182.000
4 01	03	47			Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					30.000.000		31.633.000		32.769.000		33.945.000	35.164.000
4 01	03	47 01			Penguatan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang masalah kesejahteraan Sosial	Tahun		1	30.000.000	1	31.633.000	1	32.769.000	1	33.945.000	1	35.164.000
4 01	03	48			Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) Termasuk HIV/AIDS					500.000.000		517.218.000		535.786.000		555.021.000	574.946.000
4 01	03	48 01			Pencegahan Pemberantasan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Tahun		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
4 01	03	48 02			Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPA D Provinsi NTB)	Tahun		1	400.000.000	1	417.218.000	1	435.786.000	1	455.021.000	1	474.946.000
4 01	03	49			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					27.500.000		28.997.000		30.038.000		31.116.000	32.233.000
4 01	03	49 01			Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Tahun		1	27.500.000	1	28.997.000	1	30.038.000	1	31.116.000	1	32.233.000
4 01	03	51			Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan					0		59.750.000		61.895.000		64.117.000	66.419.000
4 01	03	51 11			Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Tahun		1	0	1	59.750.000	1	61.895.000	1	64.117.000	1	66.419.000
										0		232.117.544		246.107.978		260.831.083	273.895.306
					BIRO PEREKONOMIAN					2.064.129.068		2.185.489.687		2.317.224.814		2.455.747.708	2.578.837.029
4 01	03	01			01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					241.289.499		244.424.344		259.156.742		274.660.140	288.417.485
4 01	03	01 01			Penyediaan jasa surat menyurat	surat		2500	1.150.000	2522	1.155.076	2530	1.160.005	2540	1.199.998	2545	1.239.924
4 01	03	01 02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening		2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.500.000	2	12.600.000	2	12.700.000
4 01	03	01 07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Orang		6	56.736.348	6	56.733.798	6	59.236.782	6	59.392.692	6	59.397.720
4 01	03	01 10			Penyediaan alat tulis kantor	Jenis		15	8.023.995	15	8.103.990	15	8.149.995	15	8.299.995	15	8.499.990

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume
4	01	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis		4	1.700.000	4	1.750.000	4	180.000	4	1.850.000	4	1.900.000
4	01	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Exemplar		60	4.999.980	60	4.999.980	60	5.499.960	60	5.499.960	65	5.999.955
4	01	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	OK		36	5.549.976	40	5.560.000	50	10.000.000	50	11.000.000	55	11.999.900
4	01	03	01	18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	OT		40	52.499.200	45	52.996.500	50	55.000.000	55	59.999.995	60	69.999.996
4	01	03	01	19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Orang		1	39.200.000	1	40.600.000	1	42.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000
4	01	03	01	20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	OT		20	59.430.000	25	60.525.000	30	65.430.000	35	72.817.500	40	74.680.000
4	01	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				83.350.000		87.880.000		93.184.100		98.758.850		103.705.600
4	01	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit		16	81.350.000	16	83.880.000	16	87.185.600	16	90.752.000	16	97.705.600
4	01	03	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Unit		40	2.000.000	40	4.000.000	45	5.998.500	45	8.006.850	40	6.000.000
4	01	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0		50.000.000		53.013.680		56.185.000		58.999.000
4	01	03	05	05	Peningkatan SDM Aparatur	OK		20	0	20	50.000.000	20	53.013.680	20	56.185.000	20	58.999.000
4	01	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				84.429.980		88.026.000		93.331.500		98.915.000		103.869.000
4	01	03	06	011	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen		1	0	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000
4	01	03	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen		1	12.800.000	1	12.800.000	1	12.800.000	1	12.800.000	1	12.800.000
4	01	03	06	05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Dokumen		6	71.629.980	5	63.226.000	5	68.531.500	5	74.115.000	5	79.069.000
4	01	03	07		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah				10.051.000		10.598.000		11.236.927		11.909.000		12.505.661
4	01	03	07	01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Dokumen		1	10.051.000	1	10.598.000	1	11.236.927	1	11.909.000	1	12.505.661
4	01	03	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				395.868.889		417.418.543		442.577.968		469.054.083		492.548.346
4	01	03	17	20	Monitoring dan evaluasi Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah	Perusahaan		11	279.156.889	11	294.906.420	11	312.660.805	11	331.480.454	11	350.201.789

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya										
								2019		2020		2021		2022		2023		
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran
4	01	03	17	21	Monitoring dan evaluasi Lembaga Keuangan, Koperasi dan UKM	Kegiatan		2	116.712.000	2	122.512.123	2	129.917.163	2	137.573.629	2	142.346.557	
4	01	03	22		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur dan Pengawasan				197.259.700		207.997.900		220.534.897		233.727.835		245.434.937	
4	01	03	22	03	Penataan kebijakan Perusahaan Daerah dan BUMD	Perusahaan		11	197.259.700	11	207.997.900	11	220.534.897	11	233.727.835	11	245.434.937	
4	01	03	34		Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah				705.000.000		713.377.000		756.375.000		801.524.000		841.756.000	
4	01	03	34	01	Monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	Dokumen		2	168.326.000	2	170.703.000	2	180.500.000	2	185.000.000	2	187.000.000	
4	01	03	34	02	Monitoring dan evaluasi produksi pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Dokumen		2	395.000.000	2	398.000.000	2	420.000.000	2	455.900.000	2	487.980.000	
4	01	03	34	03	Monitoring dan evaluasi bahan galian dan energi	Dokumen		2	141.674.000	2	144.674.000	2	155.875.000	2	160.624.000	2	166.776.000	
4	01	03	35		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				175.735.000		185.301.200		196.470.000		208.223.000		218.653.000	
4	01	03	35	01	Pengembangan Investasi	Kegiatan		1	175.735.000	1	185.301.200	1	196.470.000	1	208.223.000	1	218.653.000	
4	01	03	36		Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian				171.145.000		180.466.700		191.344.000		202.790.800		212.948.000	
4	01	03	36	01	Pendataan statistik perekonomian	Jenis		2	35.600.000	2	38.872.000	2	42.872.000	2	46.872.000	2	49.872.000	
4	01	03	36	02	Pengendalian inflasi daerah	Kegiatan		1	94.645.000	2	97.645.000	2	100.522.000	2	103.969.000	2	107.969.000	
4	01	03	36	03	Monitoring dan evaluasi pariwisata dan perhubungan	Dokumen		2	40.900.000	2	43.949.700	2	47.950.000	2	51.949.800	2	55.107.000	
									4.019		835.736.443							
					BIRO APP DAN LPBJP				3.516.615.650		5.201.369.463		5.592.665.100		6.771.583.180		7.700.741.360	
4	01	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				507.819.100		535.460.763		570.084.810		604.188.700		634.451.670	
4	01	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	buah		1000	9.043.000	1000	9.043.000	1000	9.100.000	1000	9.200.000	1000	9.250.000	
4	01	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jenis		2	42.274.000	2	42.274.000	2	46.084.810	2	50.298.700	2	54.701.670	
4	01	03	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jenis		26	30.600.000	26	30.600.000	26	32.000.000	26	33.000.000	26	34.000.000	

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume
4	01	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	orang		13	85.781.600	13	85.781.600	13	94.000.000	13	99.000.000	13	105.000.000
4	01	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	jenis		55	46.463.000	55	46.463.000	55	51.000.000	55	53.000.000	55	55.000.000
4	01	03	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit		0	0	1	27.643.663	1	5.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000
4	01	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	jenis		5	7.140.000	5	7.140.000	5	7.500.000	5	8.000.000	5	9.000.000
4	01	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tahun		1	39.468.000	1	39.468.000	1	42.500.000	1	44.000.000	1	45.000.000
4	01	03	01	18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tahun		1	137.034.000	10	137.034.000	10	165.000.000	10	173.000.000	10	180.000.000
4	01	03	01	19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	orang		1	38.997.000	1	38.997.000	1	42.900.000	1	47.190.000	1	52.000.000
4	01	03	01	20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	kali		1	47.694.500	1	47.694.500	1	50.000.000	1	52.500.000	1	54.000.000
4	01	03	01	25	Pengelolaan dan Penataan Arsip	berkas		3000	23.324.000	3000	23.322.000	3000	25.000.000	3000	27.500.000	3000	29.000.000
4	01	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				170.307.600		179.578.460		191.189.670		202.627.130		212.776.430
4	01	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit		21	170.307.600	22	179.578.460	22	191.189.670	22	202.627.130	22	212.776.430
4	01	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				20.000.000		21.000.000		22.000.000		23.000.000		24.000.000
4	01	03	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang	orang		76	20.000.000	100	21.000.000	100	22.000.000	100	23.000.000	100	24.000.000
4	01	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				91.595.000		95.188.000		102.610.000		107.825.000		113.364.000
4	01	03	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen		1	18.025.000	1	20.188.000	1	22.610.000	1	25.325.000	1	28.364.000
4	01	03	06	05	Penyusunan rencana kerja SKPD	dokumen		6	73.570.000	5	75.000.000	5	80.000.000	5	82.500.000	5	85.000.000
4	01	03	07		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah				10.940.000		11.535.530		12.281.400		13.016.100		13.668.060
4	01	03	07	01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	dokumen		1	10.940.000	1	11.535.530	1	12.281.400	1	13.016.100	1	13.668.060

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume
4	01	03	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				123.332.000		130.045.710		138.454.220		146.736.900		154.086.750
4	01	03	17	02	Penyusunan standar satuan harga	dokumen		3	123.332.000	3	130.045.710	3	138.454.220	3	146.736.900	3	154.086.750
4	01	03	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				2.476.568.000		3.447.121.000		3.980.725.000		4.992.140.000		5.739.104.000
4	01	03	20	13	Pengendalian pelaksanaan pembangunan provinsi NTB	dokumen		3	284.215.000	3	284.215.000	3	310.000.000	3	371.000.000	3	400.000.000
4	01	03	20	24	Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	dokumen		1	94.000.000	1	94.000.000	1	125.000.000	1	190.000.000	1	230.000.000
4	01	03	20	27	Pengendalian administrasi pembangunan sumber daya air dan lingkungan hidup	dokumen		1	78.000.000	1	78.000.000	1	110.000.000	1	175.000.000	1	205.000.000
4	01	03	20	28	Pengendalian administrasi Pembangunan perhubungan dan tata ruang	dokumen		2	81.500.000	1	81.500.000	1	115.000.000	1	175.000.000	1	210.000.000
4	01	03	20	29	Pengendalian administrasi pembangunan ekonomi	dokumen		1	89.000.000	1	172.838.000	1	210.000.000	1	290.000.000	1	320.000.000
4	01	03	20	30	Pengendalian administrasi pembangunan sosial budaya	dokumen		1	81.500.000	1	81.500.000	1	80.000.000	1	140.000.000	1	166.000.000
4	01	03	20	31	Pengendalian dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	level		3	1.652.049.000	85	2.401.264.000	85	2.761.191.000	85	3.196.140.000	85	3.673.104.000
4	01	03	20	33	Pengendalian administrasi pembangunan kesejahteraan rakyat	dokumen		1	81.500.000	1	81.500.000	1	80.000.000	1	140.000.000	1	175.000.000
4	01	03	20	34	Pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah	kali		1	22.790.000	5	110.290.000	6	121.319.000	6	190.000.000	6	215.000.000
4	01	03	20	35	Pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	sistem		2	12.014.000	2	62.014.000	3	68.215.000	3	125.000.000	3	145.000.000
4	01	03	56		Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement				116.053.950		781.440.000		575.320.000		682.049.350		809.290.450
4	01	03	56	01	Penguatan Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	prov		49	53.562.500	49	253.300.000	49	260.000.000	49	280.000.000	49	300.000.000
4	01	03	56	02	Penguatan Standarisasi LPSE Provinsi NTB	standar		5	62.491.450	12	528.140.000	17	315.320.000	17	402.049.350	17	509.290.450
4	01	03	56	03	Penguatan Kapasitas SDM LPSE Provinsi NTB	orang		0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
									0		0		0		0		0
					BIRO ADMINISTRASI KERJASAMA				1.339.999.983		4.600.438.980		4.970.463.729		5.368.210.459		5.797.690.185
4	01	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.071.199.985		338.038.980		367.242.000		396.621.000		428.351.000

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya										
								2019		2020		2021		2022		2023		
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran
4	01	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	surat		2500	10.000.000	1200	4.800.000	1250	5.000.000	1300	5.200.000	1350	5.400.000	
4	01	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan		0	0	12	9.600.000	12	9.780.000	12	9.960.000	12	10.140.000	
4	01	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit		0	0	13	6.000.000	13	6.500.000	13	6.825.000	13	7.150.000	
4	01	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	OB		57	44.356.000	48	48.420.000	48	48.480.000	48	48.960.000	48	49.440.000	
4	01	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	buah		900	37.104.993	650	20.000.000	670	24.467.000	690	30.304.000	720	36.342.000	
4	01	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Eksemplar		65	8.055.000	70	10.938.987	75	12.000.000	80	12.800.000	85	13.600.000	
4	01	03	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	buah		153	655.299.999	10	20.000.000	14	28.000.000	17	34.000.000	21	42.000.000	
4	01	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Eksemplar		1441	5.999.993	2160	8.279.993	2160	8.640.000	2160	9.072.000	2160	9.504.000	
4	01	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	OK		740	37.000.000	600	30.000.000	625	31.875.000	650	33.800.000	675	35.775.000	
4	01	03	01	18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	OT		34	273.384.000	17	140.000.000	18	148.500.000	19	157.700.000	20	167.000.000	
4	01	03	01	20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	OT		0	0	10	40.000.000	11	44.000.000	12	48.000.000	13	52.000.000	
4	01	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				83.799.998		880.000.000		950.229.729		1.026.359.459		1.108.489.189	
4	01	03	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Unit		0	0	11	780.000.000	11	792.000.000	11	803.000.000	11	814.000.000	
4	01	03	02	13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit		0	0	8	20.500.000	10	78.000.000	20	142.400.000	20	212.800.000	
4	01	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit		13	69.600.000	13	52.500.000	13	52.500.000	13	52.500.000	13	52.500.000	
4	01	03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Unit		34	14.199.998	37	27.000.000	38	27.729.729	39	28.459.459	40	29.189.189	
4	01	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				10.000.000		215.350.000		232.578.000		251.184.000		271.279.000	
4	01	03	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen		3	10.000.000	1	95.750.000	1	98.000.000	1	100.000.000	1	102.000.000	
4	01	03	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dok			0	1	15.150.000	1	15.200.000	1	15.250.000	1	15.300.000	
4	01	03	06	05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Dok			0	3	104.450.000	3	119.378.000	3	135.934.000	3	153.979.000	

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume
4 01	03	07			Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah				25.000.000		25.850.000		27.918.000		30.151.000		32.564.000
4 01	03	07	01		Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Dokumen		1	25.000.000	1	25.850.000	1	27.918.000	1	30.151.000	1	32.564.000
4 01	03	54			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				150.000.000		0		0		0		0
4 01	03		54	01	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	OT		31	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 01	03		61		Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	%			0		878.000.000		948.240.000		1.024.099.000		1.106.026.999
4 01	03		61	01	Pengembangan dan Penataan Kerjasama Pemerintahan antar Kabupaten/Kota	Dok			0	10	156.000.000	12	168.480.000	14	181.958.400	16	196.515.072
4 01	03		61	02	Pengembangan dan Penataan Kerjasama Pemerintahan antar Daerah Provinsi	Dok			0	5	244.000.000	8	263.520.000	10	284.601.600	12	307.369.728
4 01	03		61	03	Pengembangan dan Penataan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri	Dok			0	4	478.000.000	5	516.240.000	6	557.539.000	7	602.142.199
4 01	03		62		Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	%			0		888.000.000		959.040.000		1.035.763.000		1.118.623.997
4 01	03		62	01	Pengembangan dan Penataan Kerjasama Non Pemerintahan antar Kabupaten/Kota	Dok			0	10	166.000.000	12	179.280.000	15	194.205.600	15	209.742.048
4 01	03		62	02	Pengembangan dan Penataan Kerjasama Non Pemerintahan antar Daerah Provinsi	Dok			0	5	144.000.000	8	155.520.000	10	167.961.600	10	181.398.528
4 01	03		62	03	Pengembangan dan Penataan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri	Dok			0	4	578.000.000	5	624.240.000	6	673.595.800	7	727.483.421
4 01	03		63		Program Pengendalian Kerjasama Daerah	%			0		1.375.200.000		1.485.216.000		1.604.033.000		1.732.356.000
4 01	03		63	01	Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama Pemerintahan	Dok			0	19	940.350.000	25	1.015.578.000	30	1.096.824.240	35	1.184.570.179
4 01	03		63	02	Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama Non Pemerintahan	Dok			0	19	434.850.000	25	469.638.000	31	507.208.760	32	547.785.821
									0		0		0		0		0
					BIRO ORGANISASI				1.979.971.895		2.346.787.179		2.219.500.739		2.351.237.629		2.394.071.092

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume
4	01	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%			344.635.000		363.600.000		386.240.000		409.550.000		430.985.000
4	01	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	OB		60	46.800.000	60	48.000.000	60	48.600.000	60	49.200.000	60	49.800.000
4	01	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	jenis		45	33.435.000	45	35.100.000	45	41.040.000	45	42.750.000	45	42.525.000
4	01	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Eksemplar		100	8.400.000	100	10.000.000	110	11.000.000	110	11.000.000	110	11.000.000
4	01	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Eksemplar		3600	18.000.000	3600	18.000.000	3600	21.600.000	3600	21.600.000	3600	23.400.000
4	01	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Porsi		1000	50.000.000	1000	50.000.000	1000	55.000.000	1000	55.000.000	996	59.760.000
4	01	03	01	18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	OT		5	32.000.000	17	110.500.000	18	117.000.000	20	130.000.000	21	136.500.000
4	01	03	01	20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	OT		39	156.000.000	23	92.000.000	23	92.000.000	25	100.000.000	27	108.000.000
4	01	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%			198.391.954		209.192.660		222.717.620		236.041.100		247.864.090
4	01	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit		24	162.391.992	24	178.631.184	24	196.494.312	24	216.143.736	24	237.758.112
4	01	03	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	unit		58	35.999.962	58	30.561.476	58	26.223.308	58	19.897.364	58	10.105.978
4	01	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%			20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
4	01	03	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	orang		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
4	01	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%			86.590.000		91.268.616		97.207.142		103.022.314		108.182.558
4	01	03	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dok		8	20.665.000	8	22.731.496	8	25.004.648	8	27.505.112	8	30.255.624
4	01	03	06	05	Penyusunan rencana kerja SKPD	dok		2	65.925.000	2	68.537.120	2	72.202.494	2	75.517.202	2	77.926.934
4	01	03	07		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	dok			12.480.000		13.159.362		14.010.222		14.848.349		15.592.082
4	01	03	07	01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	dok		1	12.480.000	1	13.159.362	1	14.010.222	1	14.848.349	1	15.592.082

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume
4	01	03	19		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				228.366.999		240.798.390		256.367.979		271.704.552		285.313.833
4	01	03	19	01	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik	buah		21	228.366.999	21	240.798.390	21	256.367.979	21	271.704.552	21	285.313.833
4	01	03	21		Program Evaluasi Kinerja SKPD	%			59.862.690		63.121.365		67.202.685		71.222.895		0
4	01	03	21	01	Penilaian Kinerja SKPD	Dokumen		1	59.862.690	1	63.121.365	1	67.202.685	1	71.222.895	0	0
4	01	03	23		Program Pengembangan Sistem Analisis Formasi Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	%			299.999.952		316.330.814		336.784.146		356.931.406		374.809.650
4	01	03	23	01	Penyusunan Analisis Jabatan dan Formasi Jabatan	dok		56	159.999.952	56	168.705.600	56	179.600.568	56	190.349.656	56	201.564.384
4	01	03	23	03	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	dok		2	140.000.000	2	147.625.214	2	157.183.578	2	166.581.750	2	173.245.266
4	01	03	24		Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	%			223.660.300		235.835.480		251.084.172		266.104.652		279.433.464
4	01	03	24	01	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	dok		4	223.660.300	4	235.835.480	4	251.084.172	4	266.104.652	4	279.433.464
4	01	03	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	%			397.500.000		419.100.000		446.100.000		472.740.000		496.353.000
4	01	03	27	11	Penataan Perangkat Daerah Provinsi	Dokumen		3	397.500.000	3	419.100.000	3	446.100.000	3	472.740.000	3	496.353.000
4	01	03	30		Program Reformasi Ketatalaksanaan	%			61.600.000		64.953.260		69.153.019		73.289.925		76.960.915
4	01	03	30	01	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD	dokumen		1	61.600.000	1	64.953.260	1	69.153.019	1	73.289.925	1	76.960.915
4	01	03	31		Program Peningkatan Budaya Kerja	%			46.885.000		49.437.232		52.633.754		55.782.436		58.576.500
4	01	03	31	01	Peningkatan dan Pengembangan Budaya Kerja	dok		2	46.885.000	2	49.437.232	2	52.633.754	2	55.782.436	2	58.576.500
4	01	03	58		Program Pengelolaan Kelembagaan IT Pelayanan Publik	%			0		100.000.000		0		0		0
4	01	03	58	01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	dok		0	0	10	100.000.000	0	0	0	0	0	0
4	01	03	59		Program Pemenuhan Kepatuhan Pelayanan Publik				0		60.000.000		0		0		0
4	01	03	59	01	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik	unit kerja		0	0	40	60.000.000	0	0	0	0	0	0

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume
4	01	03	60		Program Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik				0		99.990.000		0		0		0
4	01	03	60	01	Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan publik	inovasi		0	0	66	99.990.000	0	0	0	0	0	0

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume
					BIRO UMUM				27.073.214.363		29.653.881.126		31.568.734.280		33.458.008.053		35.286.172.228
4	01	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%			15.675.904.843		16.626.335.062		17.701.363.184		18.760.303.172		19.699.980.358
4	01	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat		40000	12.856.500	40000	29.851.500	40000	33.014.400	40000	32.244.000	40000	32.619.200
4	01	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening		59	1.633.003.443	59	1.719.300.162	59	2.000.000.000	59	2.226.934.170	59	2.408.325.515
4	01	03	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Buah		520	833.050.000	520	825.700.000	870	870.900.000	922	922.975.000	969	969.121.000
4	01	03	01	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Orang		1704	140.733.000	1860	149.551.700	2504	156.520.007	2504	165.880.009	2504	181.189.315
4	01	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit		87	161.650.000	100	170.399.000	94	179.072.999	97	190.535.000	98	200.061.000
4	01	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	OB		156	179.786.500	156	189.462.400	156	199.955.000	156	211.912.000	159	222.508.000
4	01	03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	OB		912	1.836.200.320	912	1.934.140.000	912	2.042.186.999	912	2.164.310.000	912	2.272.525.002
4	01	03	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	unit		63	27.500.000	66	28.900.000	72	30.584.000	72	32.450.000	72	34.034.000
4	01	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	buah		4289	70.160.000	5428	73.699.200	4289	78.029.991	4289	82.695.995	4289	86.831.019
4	01	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Eksemplar		335	57.200.000	280	54.591.000	335	63.615.998	335	67.421.009	335	70.792.009
4	01	03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Buah		1188	109.910.000	1366	258.415.000	790	122.292.171	850	130.629.899	900	136.919.171
4	01	03	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	buah		4220	499.652.500	5233	722.112.100	3877	723.897.738	3877	671.973.000	3877	702.791.505
4	01	03	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	buah		857	254.390.000	684	169.755.000	281	282.928.000	281	298.102.405	870	312.153.627
4	01	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	eksemplar		14800	55.200.000	16280	58.200.000	17908	61.392.027	19699	65.063.630	21669	68.316.940
4	01	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	OK		66845	3.793.511.400	72153	3.939.511.400	80882	4.219.047.766	88971	4.500.387.174	97868	4.694.951.099
4	01	03	01	18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	OT		63	711.073.000	66	816.554.000	76	797.586.252	84	851.490.108	92	877.767.392
4	01	03	01	19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	OB		1392	3.107.058.420	1658	3.185.287.160	1658	3.342.138.533	1658	3.500.000.005	1658	3.649.721.006
4	01	03	01	20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	OT		470	789.960.000	521	827.611.120	569	878.973.305	626	929.249.768	688	977.492.560
4	01	03	01	24	Penyediaan jasa keamanan kantor	OB		468	1.167.584.760	468	1.187.779.320	468	1.318.083.998	468	1.396.900.000	468	1.466.750.998
4	01	03	01	25	Pengelola Kearsipan	berkas		35000	235.425.000	40000	285.515.000	50000	301.144.000	50000	319.150.000	50000	335.110.000
4	01	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%			7.733.214.720		9.155.493.684		9.748.429.376		10.331.604.698		10.849.100.326
4	01	03	02	03	Pembangunan gedung kantor	Geddung		2	228.760.000	4	161.709.224	3	288.122.000	3	355.351.000	3	320.650.000
4	01	03	02	04	Pengadaan mobil jabatan	unit		1	440.810.000	1	1.364.207.000	0	0	0	0	2	2.420.179.326
4	01	03	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	unit		4	631.230.000	2	861.890.000	3	1.592.837.000	3	1.688.088.000	0	0

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya										
								2019		2020		2021		2022		2023		
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran
4	01	03	02	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Buah		143	1.610.762.420	266	1.254.003.500	173	1.517.369.873	190	1.608.388.000	209	1.688.967.999	
4	01	03	02	10	Pengadaan mebeleur	buah		17	76.000.000	14	49.700.000	18	50.456.529	20	53.919.000	22	56.621.000	
4	01	03	02	11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	unit		34	327.950.000	31	322.350.000	36	352.867.438	40	377.085.000	44	395.977.000	
4	01	03	02	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	rumah jabatan		3	729.146.000	3	783.646.000	3	803.081.000	3	951.105.000	3	899.354.550	
4	01	03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung		7	427.336.800	7	492.336.800	7	575.230.000	7	645.241.099	7	528.882.000	
4	01	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit		85	1.677.971.500	85	1.691.465.000	91	1.711.094.000	94	1.750.000.000	97	1.813.788.345	
4	01	03	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	unit		284	136.050.000	248	143.455.560	347	151.297.000	383	160.344.999	423	168.378.001	
4	01	03	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	unit		30	38.575.000	30	38.575.000	93	42.898.000	129	45.463.000	169	47.741.104	
4	01	03	02	32	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	paket		3	81.000.000	4	714.534.900	3	448.694.000	3	475.526.000	3	499.350.000	
4	01	03	02	40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Rumah Jabatan		3	837.622.000	3	688.969.000	3	1.510.604.271	3	1.513.708.600	3	1.455.933.801	
4	01	03	02	42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	gedung		7	490.001.000	4	588.651.700	7	703.878.265	7	707.385.000	7	553.277.200	
4	01	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	%			0				0		0		152.000.000	
4	01	03	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel		0	0	175	87.500.000	0	0	0	0	190	95.000.000	
4	01	03	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari	stel		0	0	175	52.500.000	0	0	0	0	190	57.000.000	
4	01	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%			517.155.000		545.306.870		577.094.919		612.371.288		643.343.619	
4	01	03	05	04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	jam		336	18.955.000	336	19.989.000	336	21.294.000	336	22.567.000	336	23.697.001	
4	01	03	05	05	Peningkatan SDM Aparatur	orang		2	8.200.000	2	41.557.870	2	12.500.000	2	14.000.000	2	15.000.000	
4	01	03	05	25	Pembinaan dan Pelatihan Marching Band	kali		74	490.000.000	74	483.760.000	74	543.300.919	74	575.804.288	74	604.646.618	
4	01	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	B			420.486.000		443.375.594		472.043.451		500.282.265		525.340.704	
4	01	03	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen		2	84.800.000	2	89.428.594	2	95.200.000	2	100.890.000	2	105.945.000	
4	01	03	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	dokumen		2	85.830.000	2	90.500.000	2	96.350.000	2	102.126.265	2	107.235.704	
4	01	03	06	05	Penyusunan rencana kerja SKPD	dokumen		6	249.856.000	4	263.447.000	4	280.493.451	5	297.266.000	4	312.160.000	
4	01	03	07		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	dokumen			371.540.000		400.263.922		426.144.257		451.637.267		474.259.146	

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya									
								2019		2020		2021		2022		2023	
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume
4	01	03	07	01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	dokumen		2	371.540.000	2	400.263.922	2	426.144.257	2	451.637.267	2	474.259.146
4	01	03	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%			2.354.913.800		2.483.105.994		2.643.659.093		2.801.809.363		2.942.148.075
4	01	03	16	06	Peningkatan pelayanan kedinasan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	kali		13	418.215.400	2	440.000.000	2	460.000.000	2	490.000.000	2	522.500.000
4	01	03	16	07	Pelayanan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah	kali		12	1.936.698.400	12	2.043.105.994	12	2.183.659.093	12	2.311.809.363	12	2.419.648.075

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya										
								2019		2020		2021		2022		2023		
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran
					BIRO HUMAS DAN PROTOKIL					22.093.374.238		23.540.980.000		23.655.301.996		25.018.424.000		27.192.310.000
4	01	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.986.650.400		2.339.115.000		2.258.750.000		2.390.750.000		2.674.750.000
	4	01	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	surat		2500	40.000.000	3000	48.000.000	3000	48.000.000	3500	57.750.000	3500	56.000.000
	4	01	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening		6	150.800.400	6	156.000.000	6	162.000.000	6	165.000.000	6	168.000.000
	4	01	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Orang		5	53.750.000	8	95.000.000	8	100.000.000	8	110.000.000	8	125.000.000
	4	01	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Buah		50	190.000.000	50	200.915.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	250.000.000
	4	01	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Buah		344	68.800.000	350	70.000.000	350	78.750.000	350	87.500.000	375	93.750.000
	4	01	03	01	13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit		15	225.000.000	8	140.000.000	3	135.000.000	15	150.000.000	3	150.000.000
	4	01	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Paket		3	376.200.000	3	400.200.000	3	402.000.000	3	414.000.000	3	402.000.000
	4	01	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Porsi		3000	150.000.000	3000	180.000.000	3000	225.000.000	3000	225.000.000	3000	255.000.000
	4	01	03	01	18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	OT		190	408.500.000	190	475.000.000	190	418.000.000	190	475.000.000	190	570.000.000
	4	01	03	01	19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Orang		2	68.600.000	2	84.000.000	2	91.000.000	2	98.000.000	2	105.000.000
	4	01	03	01	20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	OT		150	255.000.000	190	490.000.000	190	399.000.000	190	408.500.000	200	500.000.000
4	01	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1.707.000.000		1.800.555.000		784.500.000		803.000.000		1.603.800.000
	4	01	03	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Unit		3	1.230.000.000	6	900.000.000	0	0	0	0	2	800.000.000
	4	01	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit		23	345.000.000	35	655.305.000	32	512.000.000	33	528.000.000	33	528.000.000
	4	01	03	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Unit		50	132.000.000	90	245.250.000	100	272.500.000	100	275.000.000	100	275.800.000
4	01	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					54.800.000		57.760.000		57.840.000		58.640.000		60.000.000
	4	01	03	05	05	Peningkatan SDM Aparatur	Orang		80	54.800.000	80	57.760.000	80	57.840.000	80	58.640.000	80	60.000.000
4	01	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					197.800.000		208.567.000		190.000.000		195.000.000		195.000.000
	4	01	03	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dok		2	61.400.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000
	4	01	03	06	05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Dok		5	136.400.000	4	138.567.000	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000

Kode					Program/Kegiatan	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya										
								2019		2020		2021		2022		2023		
								2018	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	Volume	Anggaran
4	01	03	07		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah				20.537.700		21.656.000		23.056.000		23.435.000		25.659.000	
4	01	03	07	01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Dok		1	20.537.700	1	21.656.000	1	23.056.000	1	23.435.000	1	25.659.000	
4	01	03	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				7.224.839.000		7.618.131.000		8.103.500.000		8.586.000.000		9.023.500.000	
4	01	03	16	01	Dialog/audiensi dengan tokoh	Keg		14	994.000.000	14	1.089.431.000	14	1.050.000.000	14	1.050.000.000	14	1.050.000.000	
4	01	03	16	02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	OK		225	380.025.000	230	388.700.000	230	391.000.000	240	408.000.000	250	437.500.000	
4	01	03	16	08	Pelayanan kedinasan kepada gubernur dan wakil gubernur	OT		300	4.625.000.100	315	4.800.000.000	315	5.512.500.000	320	5.728.000.000	350	6.300.000.000	
4	01	03	16	09	Pemantapan Pelayanan Protokoler	Keg		10	1.225.813.900	11	1.340.000.000	10	1.150.000.000	14	1.400.000.000	12	1.236.000.000	
4	01	03	52		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa				5.951.553.600		6.275.533.000		6.680.500.000		7.072.000.000		7.425.000.000	
4	01	03	52	1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Kali		400	5.951.553.600	421	6.275.533.000	431	6.680.500.000	442	7.072.000.000	450	7.425.000.000	
4	01	03	53		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media				4.950.193.538		5.219.663.000		5.557.155.996		5.889.599.000		6.184.601.000	
4	01	03	53	01	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Buah		29	720.591.971	30	745.439.970	32	795.135.968	30	720.000.000	35	871.500.000	
4	01	03	53	02	Pemantapan komunikasi dan informasi	Keg		35	1.167.502.455	35	1.167.600.000	38	1.267.870.000	40	1.360.000.000	40	1.400.000.000	
4	01	03	53	03	Peliputan kegiatan pimpinan dan program unggulan daerah	Keg		12	1.448.640.000	12	1.448.640.000	12	1.464.000.000	12	1.500.000.000	12	1.560.000.000	
4	01	03	53	04	Publikasi Program Unggulan, Pengelolaan Isu dan Kumunikasi Publik	keg		24	744.996.000	30	960.000.000	30	960.000.000	32	1.024.000.000	35	1.155.000.000	
4	01	03	53	05	Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data	Keg		12	868.463.112	12	897.983.030	12	1.070.150.028	12	1.285.599.000	12	1.198.101.000	

BAB VII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang diemban Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan unit kerja yang bertugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi yaitu pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah; pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023 yang memuat visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nusa Tenggara Barat (RPJMD) Tahun 2019-2023. Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023 merupakan komitmen Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nusa Tenggara Barat (RPJMD) Tahun 2019-2023.

Semoga dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dapat dijadikan acuan bagi setiap Biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTB 2019-2023.

No. Urut Indikator RPJMD.	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi Kinerja Aawal 2018	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Kondisi Akhir 2023	Peanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
3	Indeks Reformasi Birokrasi		B	B	B	B	BB	BB	BB	
	Nilai SAKIP			B	BB	BB	A	A	A	
	1. Persentase laporan kinerja pemerintah yang bernilai A / BB	%	50	50	75	100	100	100	100	Biro Organisasi
	2. Persentase Perangkat Daerah yang akuntabel	%	22,22	22,22	40	60	77,77	100	100	Biro Organisasi
	3. Rangking LPPD	%		100	100	100	100	100	100	Biro Pemerintahan
	4. Nilai LAKIP		B	B	BB	BB	BB	A	A	Biro Umum
	Indek Profesionalisme ASN			0,65	0,67	0,70	0,73	0,75	0,75	
	5. Persentase dokumen pendayagunaan aparatur yang tersusun	%	90	90	100	100	100	100	100	Biro Organisasi
	Persentase Kerjasama Daerah			100	100	100	100	100	100	
	6. Persentase Kerjasama Pemerintahan dan Non Pemerintahan yang terjalin	%		100 (34)	0	0	0	0	100 (34)	Bro Administrasi Kerjasama

No. Urut Indikator RPJMD.	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi Kinerja Aawal 2018	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Kondisi Akhir 2023	Peanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
	7.Persentase Kerjasama Pemerintahan yang terjalin			0	100 (38)	100 (49)	100 (58)	100 (62)	100 (62)	Bro Administrasi Kerjasama
	8.Persentase Kerjasama Non Pemerintahan yang terjalin			0	100	100	100	100	100	Bro Administrasi Kerjasama
	9.Persentase Kerjasama Daerah yang terevaluasi			0	100	100	100	100	100	Bro Administrasi Kerjasama
	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%		100	100	100	100	100	100	
	10.Tingkat kepatuhan OPD terhadap standar harga	%	76	76	82	87	93	98	98	Biro APP dan LPBJP
	Indeks Pelayanan Publik			97,78	97,87	97,97	98,07	98,17		
	11.Jumlah Unit Kerja Pelayanan publik yang berprestasi			9	15	21	27	34	34	Biro Organisasi
	12.Persentase Unit Kerja Pelayanan publik yang survey kepuasan masyarakat meningkat	%	60	60	80	100	100	100	100	Biro Organisasi
	13. Persentase Kerjasama Informasi dan Media Massa	%	90	90	90	92	94	97	97	Biro Humas dan Protokol
	14.Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	3	3	3	4	4	4	4	Biro APP dan LPBJP
	15.Prosentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan sesuai Standar (17 Std)	%	100	100	100	100	100	100	100	Biro APP dan LPBJP

No. Urut Indikator RPJMD.	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi Kinerja Aawal 2018	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Kondisi Akhir 2023	Peanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
13	Indeks Kriminalitas		7,25	16,45	15,65	14,85	14,05	13,25	13,25	
	16.Prosentase Pelaksanaan kegiatan Keagamaan	%	100	100	100	100	100	100	100	Biro Kesra
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%		100	100	100	100	100		
	17.Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk	%	100	100	100	100	100	100	100	Biro Hukum
	18.Persentase penanganan kasus-kasus hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	Biro Hukum

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, yang dikelompokkan kedalam masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nusa Tenggara Barat (RPJMD) Tahun 2019-2023.

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2023 yang berisikan indikator kinerja, kondisi kinerja pada awal periode RPJMD, target capaian setiap tahun dan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD sebagaimana tercantum dalam tabel 7.1 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023.